

**KEPEMILIKAN MEREK PERSEORANGAN YANG DIGUNAKAN DALAM
PERSEROAN TERBATAS
(ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NIAGA
SURABAYA NOMOR:08/HKI.MERЕК/2014/PN.NIAGA.SBY
TERKAIT KASUS MERЕК “GOOD DAY”)**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagaimana Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :
SUCI RACHMAWATI
NIM 125010101111118



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2016**

**KEPEMILIKAN MEREK PERSEORANGAN YANG DIGUNAKAN DALAM
PERSEROAN TERBATAS
(ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NIAGA
SURABAYA NOMOR:08/HKI.MERЕК/2014/PN.NIAGA.SBY
TERKAIT KASUS MERЕК “GOOD DAY”)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagaimana Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :
SUCI RACHMAWATI
NIM 125010101111118



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2016**

**KEPEMILIKAN MEREK PERSEORANGAN YANG DIGUNAKAN
DALAM PERSEROAN TERBATAS
(ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NIAGA
SURABAYA NOMOR: 08/HKI.MERЕК/2014/PN.NIAGA.SBY
TERKAIT KASUS MERЕК “GOOD DAY”)**

Suci Rachmawati, Sentot P.Sigito, Yenni Eta Widyanti

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: Sucir.aisyah@gmail.com

ABSTRAK

Merek Dagang merupakan merek yang digunakan untuk melakukan sebuah perdagangan pada barang yang diperdagangkan, baik secara perorangan, maupun beberapa orang secara berkelompok ataupun badan hukum. Merek yang digunakan dalam badan hukum dengan merek yang digunakan perorangan memiliki sebuah fungsi yang berbeda, Merek yang digunakan dalam Perseroan merupakan sebuah asset yang dimiliki oleh Perseroan, sedangkan Merek yang digunakan oleh Perorangan merupakan Asset milik perorangan yang langsung berkaitan dengan harta dari perseorangan tersebut. Direksi merupakan bagian dari Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab akan kepengurusan Perseroan sesuai dengan maksud dari tujuan Perseroan. Sebaiknya ketika kepemilikan merek yang didaftarkan milik perseorangan atas nama dari pengurus Perseroan yaitu Direksi, sebaiknya penggunaanya antara merek perseorangan dengan merek perseroan dilakukan perjanjian dahulu agar tidak terjadi pencampuran Asset milik pribadi tapi digunakan dalam Perseroan. Maka Penelitian secara Normatif ini menganalisis mengenai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Kata Kunci: Merek, Perseorangan, Perseroan Terbatas.

ABSTRACT

Trademark is a brand employed in a trading of goods carried out by individual, groups, or corporations. The brand used by the corporation and employed by the individual carries different function. The brand used by the company is an asset, but the brand utilized by the individual is a personal asset, which directly relates to the wealth of this individual. Director is a part of company whose authority and responsibility is to manage the company according to its aims. When a brand ownership owned by the individual is registered on the behalf of the company's committee, which is the director, an agreement should be made to avoid mixed asset between the individual and the company. Thus, this normative research is analyzing the Law Number 15 of 2001 about Brands.

Key words: Brand, Individual, Limited (Ltd.) Company.

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **KEPEMILIKAN MEREK PERSEORANGAN
YANG DIGUNAKAN DALAM PERSEROAN
TERBATAS (ANALISIS YURIDIS TERHADAP
PUTUSAN PENGADILAN NIAGA SURABAYA
NOMOR: 08/HKLMEREK/2014/PN.NIAGA.SBY
DALAM KASUS MEREK "GOOD DAY")**

Identitas Penulis :

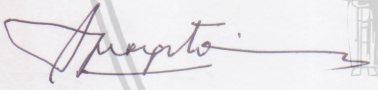
- a. Nama : Suci Rachmawati
b. NIM : 125010101111118
c. Konsentrasi : Hukum Perdata Ekonomi dan Bisnis

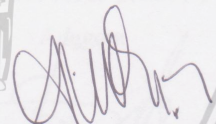
Jangka Waktu Penelitian : 6 Bulan

Disetujui pada tanggal : 02 Maret 2016

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Sentot P. Sigito, S.H, Mhum
NIP. 19600423 198601 1 002


Yenny Etta Widyanti, SH, MH.
NIP. 19790603 200812 2 002

Mengetahui,

Ketua Bagian

Hukum Perdata


Dr. Budi Santoso, SH, LLM
NIP. 19720622 200501 1 002

HALAMAN PENGESAHAN

**KEPEMILIKAN MEREK PERSEORANGAN YANG DIGUNAKAN
DALAM PERSEROAN TERBATAS
(ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NIAGA
SURABAYA NOMOR: 08/HKL.MERЕК/2014/PN.NIAGA.SBY TERKAIT
KASUS MERЕК "GOOD DAY")**

Oleh :
SUCI RACHMAWATI
125010101111118

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal : **01 DEC 2016**

Ketua majelis penguji

Sekretaris Majelis penguji

Dr. Bambang Winarno, SH., MS.
NIP. 19530121 197903 1 002

M. Zairul Alam, SH., MH.
NIP. 19740909 200601 1 002

Anggota

Anggota

Sentot P. Sigito, SH., M.Hum.
NIP. 19600423 198601 1 002

Imam Ismanu, SH., MS.
NIP. 19510727 198002 1 001

Ketua Bagian Hukum Perdata

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Budi Santoso, SH.,LLM.
NIP. 19720622 200501 1 002

Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si.
NIP. 19620805 198802 1 001

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Rachmad Syafaat, S.H.,M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Budi Santoso, SH.LLM., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata
3. Bapak Sentot P.Sigito, SH.Mhum., selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan, kesabaran dan motivasinya.
4. Ibu Yenny Eta Widyanti, SH.MH., selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan, kesabaran dan motivasinya.
5. Ayahanda Darwoto dan Ibunda Supriyatin selaku orang tua penulis untuk tetap selalu memberikan doa dan dukungannya.
6. Gandung Permana, S.H, Gebila Septya Kartikasari, S.H dan Desak Made Trisna Dwijayanti sudah memberikan saran, masukan dan dukungan dalam pembuatan skripsi ini.
7. Seluruh saudara-saudara penulis, Dynda Fanisha, S.H, Stevana Claudia, Khalida Widyasari, Gheby Putri, Muhammad Ajid husaen, Vivi Juanita, Yusuf Efendi, Rian Syahrani, Chindy Nur ariani, Cantik Fajar, Arum dewi, Astrid Puspitasari , Emilia Dewi dan teman-teman wss, serta angkatan 2012 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, kakak dan adik tingkat yang telah memberikan semangat, dukungan dn doanya yang selalu mengiringi dalam pembuatan skripsi ini.
8. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis yakni skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak sengaja.

Semoga Allah SWT mengampuni kesalahan kita dan berkenaan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, Maret 2016

Penulis



DAFTAR ISI

Lembaran Persetujuan	i
Lembaran Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Abstraksi	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Sistematika Penulisan	14

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Merek Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual	15
B. Definisi Merek	17
C. Merek Salah Satu Properti	20
D. Maksud dan Tujuan Pendaftaran Merek	22
E. Fungsi Merek	23
F. Syarat dan Tata Cara Permohonan Merek	24
G. Jangka Waktu Perlindungan	25
H. Perseroan Terbatas	31
I. Perseroan lahir dari Proses Hukum	32
J. Maksud dan Tujuan Perseroan	39
K. Ketentuan Hukum yang Mengikat Perseroan	45
L. Asas-asas Hukum	46
M. Direksi	47
N. Aset Perseroan	48
O. Perdamaian	53
P. Teori Ilmu Hukum Normatif	54
Q. Wajib Daftar Perusahaan	56

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	57
B. Metode Pendekatan	57
C. Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum	58
D. Teknik Pengumpulan	60
E. Teknik Analisis	60
F. Definisi Konseptual	61

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kepemilikan Merek Perseorangan yang Digunakan Dalam Perseroan Terbatas	62
1. Salah Pemakaian	64
2. Penghapusan Merek	72
3. Bertentangan dengan Asas Perusahaan	74
4. Tugas Direksi	79
B. Analisis Keterkaitan Antara Kepemilikan Merek Perseorangan Yang digunakan Dalam PT.Sentosa Jaya Abadi	85



1. Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor:	
08/HKI.MEREK/2014/PN.NIAGA.SBY	85
2. Pertimbangan Hukum dan Putusan Hakim	88

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	93
B. Saran	95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Daftar Kelas Barang	26



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.....	96
Gambar 2.....	98



GAMBAR LAMPIRAN

Kartu Bimbingan Skripsi.....	110
Kartu Keterangan Plagiasi.....	111
Surat Bimbingan Skripsi.....	112
Surat Keterangan Lembaga Penerjemah Bahasa Inggris.....	113





BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Di zaman yang serba modern ini, manusia dituntut oleh perkembangan zaman untuk selalu bisa mengembangkan diri, berinovasi dan berkreasi. Manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam hidup banyak melakukan berbagai usaha untuk menciptakan sebuah barang dan/atau jasa yang dapat diperjualbelikan atau bernilai komersial sehingga dapat menghasilkan sebuah uang.

Di dunia ini semua makhluk hidup merupakan ciptaan Allah S.W.T, manusia sebagai makhluk manusia yang paling istimewa karena diberikan oleh Allah S.W.T akal pikiran serta nafsu. Maka keistimewaan yang diberikan oleh Allah ini menjadikan manusia mempunyai keinginan dimana karya yang diciptakannya diakui oleh manusia lainnya karena itu menimbulkan sebuah hak untuk dihargai, diakui dan dihormati.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berkaitan dengan hak milik (intelektual), diatur dalam Pasal 28 H ayat (4), dimana setiap orang berhak memiliki hak milik pribadi dan hak milik tersebut dan tidak boleh diambil alih secara semena-mena oleh siapa pun. Sebagai Hak Kekayaan Intelektual (H.K.I) yang dilindungi serta menunjukkan pentingnya pemahaman mengenai H.K.I untuk masyarakat.

H.K.I merupakan salah satu hasil pola pemikiran manusia dalam satu system yang berguna untuk masyarakat karena dalam H.K.I tersebut

mengandung nilai komersial didalamnya¹. Salah satu cabang ilmu H.K.I yang dilindungi yaitu mengenai tentang Merek Dagang. Merek merupakan sebuah tanda yang digunakan untuk barang atau jasa yang diperdagangkan. Merek dapat berupakata, huruf, gambar, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut termasuk dengan warna dan garis. Untuk membedakan sebuah merek satu dengan yang lainnya merek dapat dibentuk dengan sederhana, akan tetapi adakalanya merek diciptakan dengan nilai yang kreatif yang tinggi, bahkan ada juga berupa kata ciptaan (*invented word*) yang sangat inovatif.²

Undang-Undang merek itu sendiri diatur didalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 (Untuk selanjutnya disebut dengan UU Merek). Pasal 1 ayat (2) UU Merek berbunyi:

“Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang yang sejenis lainnya.”

Merek sangatlah penting digunakan pada barang yang diperdagangkan hal itu diperlukan karena di dalam era perdagangan global seperti ini, peran merek sangatlah amat penting, terutama merek tersebut digunakan untuk menjaga persaingan usaha yang sehat, serta merek tersebut digunakan untuk menjamin mutu dagang yang di perjual-belikan. Media untuk mempromosikan merek sebagai salah satu merek dagang, sangatlah bergaram dari berbagai media, baik dari berbagai media elektronik, media cetak, maupun dengan media Internet seperti sekarang yang perkembangan Teknologi yang semakin pesat karena media

¹Emmie Yuhassarie, ed, **Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya : Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya Tahun 2004**, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2009, Hlm. 79.

² Rahayu Hartini, **Hukum Komersial**. Malang: UMM Press, 2003, hal. 336

Internet itu sendiri tidak mengenal batas dan waktu dalam membantu mempromosikan barang dan jasa.

Kondisi-kondisi yang seperti menjadikan merek sebagai salah satu kekayaan yang harus dilindungi, dan sangatlah penting untuk melakukan sebuah perlindungan terhadap barang yang telah diproduksi oleh merek agar konsumen tidak salah dalam memilih barang yang dibutuhkan, dan tentunya aman digunakan oleh konsumen yang telah di produksi oleh Produsen barang maupun jasa tersebut. pada hakikatnya setiap produsen tidak semata-mata menjual barang yang di produksinya untuk meraih keuntungan semata, melainkan barang yang dijualnya dapat bermanfaat bagi konsumennya. Sebaliknya konsumen mau membeli sebuah barang karena ia membutuhkan barang tersebut, tidak mungkin apabila konsumen tersebut membeli barang tidak ada gunanya bagi dirinya karena hal tersebut sama saja membuang uang dengan percuma.

Dengan mutu yang bagus, merek yang di produksi tersebut menjadi laris di pasaran, yang dapat berakibat merek menjadi dikenal oleh banyak masyarakat, karena ketika merek itu sudah dikenal oleh masyarakat dan mutunya bagus, otomatis masyarakat akan memilih merek yang melekat pada barang yang bersangkutan.

Banyaknya usaha yang dikelola oleh beberapa orang secara bersama-sama, badan hukum atau seorang individu, membuat keberadaan merek dagang sangatlah penting, untuk membedakan hasil produksi yang dikelola oleh tiap-tiap perusahaan, baik perorangan ataupun badan hukum. Badan hukum di sini dapat berbentuk Perseroan Terbatas (P.T) atau persekutuan.

Persekutuan merupakan terjemahan dari *maatschap* (*partnership*). Persekutuan atau Perseroan Terbatas merupakan sebuah badan hukum yang didirikan berdasarkan sebuah perjanjian dan melakukan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham.³ Dalam perseroan terbatas pun adanya sebuah pemisahan antara pemilik dan pengelola usaha, sehingga dengan adanya pemisahan ini mengharuskan pengelola bekerja secara profesional. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007 (untuk selanjutnya disebut dengan U.U.P.T), organ perseroan terdiri atas;

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),
2. Direksi, dan
3. Dewan Komisaris.

RUPS merupakan organ perseroan yang tidak dapat dipisahkan dari perseroan, karena melalui RUPS tersebut para pemegang saham sebagai pemilik (*eigenaar, owner*) perseroan melakukan sebuah control terhadap kepengurusan yang telah dilakukan direksi maupun terhadap kekayaan serta kebijakan kepengurusan yang telah dijalankan oleh manajemen dari perseroan tersebut.

Sedangkan direksi itu sendiri menurut UUP.T Pasal 1 ayat (5) dijelaskan bahwa:

“Direksi merupakan sebuah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas sebuah pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar.”

³Purba P Marisi. **Aspek Akuntansi Undang-Undang Perseroan Terbatas**. Graha Ilmu: Yogyakarta. 2008

Sedangkan dewan komisaris merupakan organ perseroan yang tugasnya melakukan sebuah pengawasan secara umum maupun secara khusus sesuai dengan anggaran dasar yang ada di dalam perseroan tersebut dan memberikan nasihat kepada direksi.

Dari pengertian tersebut jelas bahwa seorang direksi mempunyai tanggung jawab penuh untuk pengurusan perseroan dan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan dalam batas-batas kekuasaan maupun kapasitas yang diberikan oleh undang-undang kepadanya, dan seorang direksi salah satunya diberikan kewenangan untuk menjalankan pengurusan.

Kewenangan menjalankan pengurusan itu semata-mata harus dilakukan untuk “kepentingan” perseroan, karena dalam menjalin pengurusan tersebut tidak boleh untuk kepentingan pribadi. Direksi dalam menjalankan kewenangan kepengurusan tidak boleh mengandung benturan kepentingan, tidak menggunakan kekayaan, uang dan milik perseroan untuk kepentingan pribadi. Tidak menggunakan posisi jabatan Direksi yang dijabatnya untuk memperoleh sebuah keuntungan dirinya sendiri.⁴ Karena setiap tindakan yang bertentangan dengan kepentingan yang ada di dalam perseroan, dapat dikatakan sebagai melanggar kewenangan dan perbuatan tersebut dapat diklasifikasikan menyalahgunakan kewenangan atau seorang direksi mempunyai itikad tidak baik dalam menjalankan perseroan tersebut.

Badan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas tersebut banyak sekali dijumpai di Indonesia, karena badan Hukum Perseroan Terbatas sebagai salah satu pilihan utama masyarakat untuk menjalankan bisnisnya. Perseroan Terbatas pun

⁴Harahap M yahya, S.H. **Hukum Perseroan Terbatas**. Sinar Grafika: Jakarta, 2011, hal.347

menjadi salah satu kontribusi terbesar terhadap perekonomian nasional jika dibandingkan dengan badan-badan hukum yang lainnya.⁵

Eksistensi Perseroan Terbatas pun tidak asing lagi di masyarakat luas, sehingga menyebabkan produk yang di kelola atau dijalankan oleh Perseroan Terbatas baik jasa maupun barang sangat sering di jumpai di masyarakat. Perseroan Terbatas yang memproduksi barang lebih sering dijumpai baik di toko-toko kecil, swalayan, maupun diluar negeri apabila produk yang diproduksi tersebut sudah di pasarkan di luar negeri dan sudah memiliki nama sendiri dalam masyarakat luar negeri. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat tersebut untuk menjalankan produksinya Perseroan Terbatas pun memiliki merek yang digunakan untuk lebih memperkenalkan produk yang di pasarkan.

Terkait dengan merek maka Daftar kelas dagang untuk kelas barang pun bervariasi untuk jenis kelas barang yang sering di jumpai di toko-toko, maupun swalayan yaitu:

Kelas 30:

Teh, kopi, gula, kakao, beras, tapioca, sagu, kopi buatan; tepung dan sediaan-sediaan terbuat dari gandum; kue-kue, roti dan kembang-kembang gula, es konsumsi; air gula, madu; ragi, bubuk pengembang roti/ kue; garam, monster, cuka, saus-saus (bumbu-bumbu); es, rempah-rempah, kecap, tauco, petis, terasi, kerupuk, emping.⁶

Berbagai jenis daftar barang tersebut produk kopi sangat sering kita jumpai sehari-hari, baik minuman kopi yang berbentuk kemasan botol, sacset, maupun berbentuk bubuk kopi. Banyak Perseroan Terbatas yang memproduksi hasil pengelolaan kopi, tak jarang juga Perseroan Terbatas tersebut sudah berpuluh-puluh tahun memproduksi dan tetap mempertahankan kualitas barang

⁵Ibid, Purba P Marisi, hlm. 2

⁶MiruAhmadi,S.H.,**Hukum Merek**.PT.RajaGrafindo Persada: Jakarta, hal.29

yang telah di produksinya tersebut, sudah pasti setiap Perseroan yang memproduksi hasil olahan produksinya memiliki Nilai merek yang mereka jual kepada khalayak masyarakat.

Pada Hakikatnya perlindungan merek di Indonesia menganut prinsip pendaftaran pertama atau *First to file*. Sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, bahwa untuk diberikan hak atas merek oleh negara maka seseorang atau badan hukum harus mengajukan permohonan pendaftaran merek secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang dilengkapi dengan persyaratan administrasi. Merek Dagang yang diproduksi merupakan sebuah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau seseorang atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang jenis lainnya. Sehingga dalam hal ini merek yang digunakan dalam Perseroan atau badan hukum dengan merek yang digunakan dalam perseorangan memiliki ciri yang berbeda.

Pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutus perkara mengenai merek Special Slimming Tea yang diputuskan dihapus dari daftar merek⁷⁷. Merek Special Slimming Tea dihapuskan karena tidak sesuai antara merek yang di daftarkan di Dirjen H.K.I dengan produk yang di pasarkan di masyarakat luas. Gugatan Nomor 31/Merek/2009/PN.Niaga JKT.PST dimana Penggugat dalam hal ini adalah PT.Mustika Ratu dan pihak Tergugat adalah PT. Phyto, yaitu permasalahannya PT.Mustika Ratu sebagai pemilik dan pendaftar pertama dari merek Slimming tea Sertifikat merek Nomor.328942 dan 34139 didaftarkan pada tahun 1995 dan di perpanjang pada tahun IDM 000074393 pada 3 Mei 2006 yaitu untuk melindungi

⁷⁷<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol23162/merek-ispecial-slimming-teai-dihapuskan> diakses Tanggal 5 Maret 2016 Pukul 19:00 WIB

jamu pelangsing. Namun pada tahun 2008 P.T Phyto yang juga sebagai produsen alat-alat kecantikan tersebut, mendaftarkan merek special slimming tea dengan nomor pendaftaran IDM 000151837 dalam kelas 5, dalam Etiket merek pendaftaran menjelaskan bahwa dalam kemasan merek berwarna hitam dan putih, tidak terdapat lukisan cangkir dan daun serta tidak ada kata PT. Phyto. PT.Phyto dalam hal ini terbukti memakai merek yang tidak sesuai dengan merek yang terdaftar, karena produk merek PT.Phyto di pasarkan tidak sama dengan yang didaftarkan pada sertifikat merek sehingga merek Special Slimming Tea di putuskan dan dihapuskan dari daftar merek.

Pada Pengadilan Niaga Surabaya terdapat kasus terkait kepemilikan merek perseorangan yang digunakan didalam Perseroan Terbatas. Namun pada prinsipnya Perseroan Itu di dirikan berdasarkan atas pemisahan harta kekayaan Pribadi dengan harta kekayaan Perseroan.

Gugatan tersebut diajukan oleh PT. Santos Jaya Coffee Company yang bergerak dibidang usaha jenis kopi dan selanjutnya pada tahun 1980 berubah nama menjadi PT. Santos Jaya Abadi⁸ yang hingga kini dikenal oleh masyarakat luas. Merupakan salah satu Perseroan yang berkembang turun temurun karena eksistensinya, dan tidak dapat dipungkiri bentuk eksistensinya sampai sekarangpun salah satunya dipengaruhi dengan adanya Merek Dagang yang dikelolanya dan di distribusikan kepada masyarakat.

Sebagai salah satu Perseroan yang sudah lama memproduksi PT. Santos Jaya Abadi selalu ingin menjaga reputasi dan eksistensinya, sehingga banyaknya variasi minuman yang berbentuk kopi di produksinya, sehingga terciptanya

⁸ Putusan Perkara Nomor : 08/HKI.MEREK/2014/PN.NIAGA.SBY, Hal.1

banyak rasa dan merek yang telah di produksi oleh PT.Santos Jaya Abadi. Salah satunya adalah merek “GOOD DAY” yang telah di konsumsi oleh masyarakat luas, baik di nasional maupun di Internasional karena pendistribusian merek “GOOD DAY” itu sendiri tidak hanya di wilayah Nasional namun di Negara lain pun dilakukan pendistribusian oleh PT. Santos Jaya Abadi.

Bahwa disebutkan diatas ,didalam Perseroan pasti adanya RUPS, Direksi dan Komisiaris. Dalam hal ini Direksi merupakan orang yang dipercaya perseroan dan mempunyai sebuah visi misi sama dengan perseroan untuk menjalankan Perseroan tersebut, namun dalam kenyataanya dalam putusan pengadilan niaga Surabaya Nomor:08/HKI.MEREK/2014/PN.NIAGA.SBY adanya permasalahan mengenai PT.Santos Jaya Abadi menggugat Direksi dari PT. Santos Jaya Abadi.

Direksi PT.Santos Jaya Abadi dalam hal ini juga mempunyai saham dalam Perseroan tersebut, dalam hal kepemilikan Merek “GOOD DAY” yang diproduksi oleh PT.Santos Jaya Abadi digunakan nama pribadi dan didaftarkan di DirektoratJenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan Atas nama pribadi yaitu SoedomoMergonoto.

Sehingga adanya gugatan yang dilayangkan oleh PT. Santos Jaya Abadi oleh Direksinya yaitu SoedomoMergonoto, karena telah mendaftarkan Merek “GOOD DAY” atas nama pribadi bukan menggunakan Perseroan Terbatas.Pemohon untuk mengajukan pendaftaran merek dagang tersebut di Undang-undang Merek tersebut dapat dilakukan oleh seorang atau secara bersama-sama , maupun menggunakan nama badan hukum sebagai pemilik merek tersebut.

Namun dalam kenyataannya, hal ini menyebabkan terbenturnya sifat yang dimiliki oleh Perseroan Terbatas yaitu dimana adanya sebuah pemisahan harta pribadi, sedangkan dalam hal ini merek dagang “GOOD DAY” di gunakan oleh Perseroan Terbatas namun atas nama perseorangan.

Maka ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU PT yang menyebutkan mengenai pengertian Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yandidirikan berdasarkan perjanjian, merupakan persekutuan modal, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi atas saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaanya”

Hal ini berbenturan dengan apa yang diatur dalam ketentuan Undang-undang merek bahwa merek Dagang yang digunakan dalam barang yang diperdagangkan oleh seseorang dengan badan hukum itu berbeda cara mengunakaannya, sedangkan dasar pendirian Perseroan yaitu adanya pemisahan harta pribadi dari pendiri perseroan yang dimana para pendirinya terdiri atas saham-saham.

Sedangkan untuk Direksinya itu sendiri, merupakan salah satu dari Organ Perseroan yang berwenang dalam menjalankan sebuah kepentingan yang ada didalam Perseroan, sesuai maksud dan tujuan Perseroan serta untuk mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan, sesuai dengan yang ada didalam ketentuan anggaran dasar Perseroan.

Sehingga disini Direksinya harusnya orang yang menjalankan kepengurusan perseroan dengan sebaik-baiknya, sedangkan disini Merek Perseorangan ini kepunyaan pribadi yang dinamakan atas nama pribadi, sehingga

status nya Direksi ini atas merek bukan kepengurusan untuk Perseroan, tapi kepemilikan merek yang diatas namakan pribadi.

Sedangkan merek merupakan Hak Kekayaan Intelektual yang di lindungi oleh Undang-Undang dan merupakan asset pribadi jika merek itu di daftarkan dengan nama perseorangan.

Berangkat dari latar belakang permasalahan tersebut di atas, penulis sangat tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“KEPEMILIKAN MEREK PERSEORANGAN YANG DIGUNAKAN DALAM PERSEROAN TERBATAS (ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NIAGA SURABAYA NOMOR: 08/HKI.MERЕК/2014/PN.NIAGA.SBY TERKAIT MERЕК “GOOD DAY”)**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kepemilikan merek perseorangan yang digunakan oleh PT. Sentosa Jaya Abadi dalam kasus merek “GOOD DAY” berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ?
2. Bagaimana analisis hukum Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 08/HKI.MERЕК/2014/PN.NIAGA.SBY terkait kepemilikan merek perserorangan yang digunakan dalam PT. Sentosa Jaya Abadi ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kepemilikan merek perseorangan yang di gunakan oleh PT.Sentosa Jaya Abadi dalam kasus merek “GOOD DAY” berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang

Merek dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor: 08/HKI.MEREK/2014/PN.NIAGA.SBY terkait kepemilikan merek perseorangan yang digunakan dalam PT.Sentosa Jaya Abadi.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat teoritis

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai masalah-masalah yang timbul dalam ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual serta kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam lapangan hukum Perdata bisnis.

2. Manfaat Praktis

2.1 Bagi Mahasiswa dan Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak civitas akademik dan kiranya dapat dijadikan referensi terkait dengan pemilikan merek perseorangan yang digunakan didalam Perseroan Terbatas.Sedangkan bagi mahasiswa sebagai salah satu bekal pengetahuan dan wawasan untuk terjun kedalam masyarakat, serta sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum.

2.2 Bagi Hakim

Diharapkan dengan adanya penelitian ini kiranya dapat menjadi referensi bagi Hakim untuk memutus perkara yang berkaitan dengan hal Merek Perseorangan yang digunakan didalam Perseroan Terbatas

2.3 Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta menambah informasi yang berguna bagi masyarakat pada umumnya dan juga sebagai referensi bahan bacaan mengenai hukum perdata ekonomi maupun mengenai Hak Kekayaan Intelektual dan mengenai Hukum Perusahaan secara khususnya.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Penelitian ini diuraikan secara sistematis untuk tujuan memudahkan penulis dalam menyusun dan mengkaji permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Adapun sistematika hasil dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang yang melatarbelakangi ditulisnya skripsi ini, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penulisan, sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka membahas mengenai teori, konsep dan istilah hukum yang mempunyai keterkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan penelitian. Dalam penyusunan bab tinjauan pustaka, berbagai bacaan yang diperoleh dari berbagai sumber dan nantinya akan dilanjutkan ke tahap pembahasan permasalahan dari penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai metode-metode ilmiah yang digunakan, rinciannya terdiri dari jenis penelitian, metode pendekatan, jenis bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisa bahan hukum dan definisi konseptual.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini hasil dan pembahasan berisi mengenai hasil dan analisis yang terkait dengan kepemilikan merek perseorangan yang digunakan dalam Perseroan Terbatas (Analsis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor: 08/HKI.MEREK/2014/PN.NIAGA.SBY Terkait dengan Merek “GOOD DAY”).

BAB V : PENUTUP

Bab penutup ini berisi mengenai kesimpulan untuk memudahkan para pembaca untuk mengetahui secara singkat dan jelas apa yang menjadi inti permasalahan yang dibahas, serta saran yang nantinya diharapkan dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak yang terkait agar kedepannya dalam menjalankan tanggung jawabnya dapat menjadi lebih baik

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Merek Dagang

1. Merek Sebagai Salah Satu Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual

HKI atau Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*) merupakan terjemahan dari hukum sistem *Anglo Saxon*⁹. Secara substantif pengertian mengenai Hak Kekayaan Intelektual (H.K.I) dapat dikatakan sebagai hak atas kepemilikan sebagai sebuah karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi.¹⁰ H.K.I itupun merupakan hak-hak hukum yang diperoleh dari aktivitas intelektual di bidang Industri, ilmu pengetahuan dan seni, yang meliputi hak dalam bidang seni (hak cipta), hak kepemilikan industry (desain industry, paten, merek, rahasia dagang, tata letak sirkuit terpadu, indikasi geografis, dan varietas tanaman).

Menurut Helianti Hilman H.K.I merupakan suatu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seseorang atau sekelompok orang atau entitas untuk memegang monopoli dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari karya intelektual yang mengandung H.K.I tersebut.¹¹ H.K.I merupakan sebuah hukum yang harus terus mengikuti setiap perkembangan teknologi untuk melindungi kepentingan dari penciptanya. Kata kepemilikan ataupun kata milik dalam H.K.I memiliki ruang lingkup yang lebih kusus dari pada istilah kekayaan. Hal ini

⁹Rachmadi Usman, **Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia**, PT. Alumni, Bandung, 2003, hal. 1.

¹⁰*Ibid*, hal 2

¹¹Helianti Hilman, **Manfaat Perlindungan Terhadap Karya Intelektual pada sistem HKI**, Disampaikan pada Lokakarya Terbatas tentang “masalah-masalah kepailitan dan wawasan Hukum Bisnis lainnya” 10-11 Februari, Financial Club, Jakarta, hlm. 4

sejalan dengan konsep yang diterapkan dalam hukum perdata di Indonesia yang menerapkan mengenai milik atas benda yang di punyai oleh seseorang.¹²

Secara factual H.K.I merupakan sebuah sistem mengenai pemberian perlindungan hukum bagi karya-karya intelektual yang mencakup jangkauan yang luas, dari pengetahuan tradisional sampai kepada program computer dan Internet di era bisnis digital saat ini.

Merek sebagai salah satu karya intelektual merupakan sebuah produk yang dapat dianggap sebagai sebuah asset yang bersifat komersial di dalam sebuah perusahaan. Awal mengenai kelahiran akan merek itu sendiri diawal dengan temuan mengenai hak kekayaan Intelektual yang lain namun juga saling berkaitan satu sama lain, seperti dalam merek pun banyak sekali unsurnya, baik unsur ciptaan (logo yang digunakan), desain huruf maupun desain angka yang digunakan, adanya hak cipta dalam bidang seni, sehingga yang dilindungi bukan hanya akan hak cipta mengenai seninya saja, tetapi yang di lindungi adalah merek yang terkait tersebut¹³.Merek memiliki arti penting dalam rangka mewujudkan persaingan usaha, Janed memberikan argumentasinya bahwa perlindungan Hukum yang diberikan kepada merek bukan hanya dilihat sebagai salah satu upaya yang secara mendasar untuk berlaku jujur dalam kegiatan usaha perdagangan, akan tetapi melalui sebuah merek produk yang dihasilkan oleh seseorang atau pelaku usaha menjadi dapat di identifikasikan berdasarkan sumber asalnya¹⁴

¹²Ahmad M.Ramli,**Hak atas Kepemilikan Intelektual:Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang**,CV.MandarMaju,Bandung,2000,hlm,24

¹³ OK Saidin, **Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (intellectual property right)**, cetakan keempat,PT.RajaGrafindo Persada,Jakarta,2004,hlm 24.

¹⁴RahmiJaned,**Hak Kekayaan Intelektual: Penyalahgunaan Hak Eksklusif**,Surabaya:Airlangga University Press,2006,Hlm.162

Sehingga merek dalam Hukum Kekayaan Intelektual sangat berharga karena dengan merek apabila dikaitkan dengan keinginan dan keterkaitan konsumen mengenai adanya sebuah produk baik barang maupun jasa, dengan merek tersebut masyarakat akan tertarik maupun kurang tertarik untuk membeli atau menggunakan barang tersebut. Sehingga merek berkembang melalui penggunaannya untuk melindungi *Goodwill* perusahaan melawan produk lain dari para pesaingnya.

Merek tidak merupakan sebuah properti yang harus dilindungi oleh hukum, jika keberadaan merek tidak terkait dengan aktivitas perdagangan, karenanya keberadaan merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual yang di lindungi bertujuan untuk memastikan bahwa pemilik merek harus menggunakan mereknya¹⁵.

2. Definisi Merek

Merek dilihat secara Yuridis menurut ketentuan dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001¹⁶ merupakan tanda berupa susunan warna, gambar, nama, kata, angka-angka, huruf-huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”. Dalam bahasa Indonesia merek berarti tanda yang dipakai paabarang yang diperdagangkan oleh suatu perusahaan.¹⁷Pengertian merek dagang dan merek jasa, yaitu:¹⁸

¹⁵ Ibid., hlm.169-170

¹⁶ Abdul Rasyid Salima, **Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus**, Kencana: Jakarta, 2005, hal.165-166

¹⁷ Pipin Syarifin dan Dedeh Jubaedah, **Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia**, Pustaka Bani Quraisi, Bandung, 2004, hlm.166

¹⁸ Lihat ketentuan Pedoman Pasal 1 (2) dan Pasal 1(3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Dagang

Merek dagang merupakan merek yang dipergunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seorang individu atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya, sedangkan merek jasa sebuah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seorang individu atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakannya dengan jasa yang sejenis.

Sedangkan pengertian Merek yang diatur dalam TRIPs Agreement dalam Pasal 15 ayat (1) adalah:

Any sign or any combination of signs, capable of distinguishing the goods of services of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark. Such signs, in particular words including personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colours as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademark. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services, members may make registrability depend on distinctiveness acquired through use. Members may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible.

Terjemahan bebas:

Setiap tanda atau kombinasi dari beberapa tanda, yang mampu membedakan antara barang atau jasa satu dari yang lain, dapat membentuk merek. Tanda-tanda tersebut, terutama yang berupa kata-kata termasuk nama orang, huruf, angka, unsur figuratif dan kombinasi dari beberapa warna, atau kombinasi warna-warna tersebut, dapat didaftarkan sebagai merek. Dalam hal suatu tanda tidak dapat membedakan secara jelas barang atau jasa satu dengan yang lain, negara anggota dapat mendasarkan keberadaan daya pembeda tanda-tanda tersebut melalui penggunaannya sebagai salah satu syarat bagi pendaftarannya.

Sedangkan menurut Pendapat para sarjana mengenai definisi merek, yaitu¹⁹:

¹⁹Saidin, **Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)**, PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta, 1997, hal 267-268

H.M.N. PurwoSutjipto,S.H., memberikan rumusan bahwa “merek merupakan sebuah tanda dengan nama suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis” sedangkan menurut Prof. R.Soekardono,S.H., bahwa “merek merupakan sebuah tanda dengan nama pribadikan sebuah barang tertentu,dimana perlu juga dipribadikan asalnya atau menjamin kualitas barang dalam perbandingan dengan barang-barang yang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan dan menurut Mr.Tirtamidjaya merumuskan bahwa “suatu merek pabrik atau merek perniagaan adalah suatu tanda yang dibubuhkan diatas bungkusannya, guna membedakan barang itu dengan barang-barang yang sejenis lainnya.

Merek merupakan suatu tanda, tetapi agar sebuah tanda tersebut dapat diterima oleh merek maka harus memiliki daya pembeda,²⁰ mengenai hal ini untuk sebuah pendaftaran merek, berkaitan dengan pemberian hak eksklusif yang diberikan oleh negara atas nama atau symbol terhadap sebuah pelaku usaha. Sehingga untuk membedakan akan daya pembeda, merek yang bersngkuta harus dapat memberikan sebuah penentuan dari barang yang akan di gunakan dalam merek tersebut.²¹

Menurut ketentuan dari UU Merek itu sendiri dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu dalam Pasal 1 angka 2 UU Merek dijelaskan bahwa merek dagang merupakan merek yang digunakan pada barang yang akan dipergunakan oleh seorang individu perorangan atau beberapa orang secara bersama-sama

²⁰Suyud Margono dan Lingginus Hadi, **Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek**, Novirindo Pustaka Mandiri,Jakarta,2002,hlm 27

²¹Sudargo Gautama dan RizawantoWinata, **Hukum Merek Indonesia**, PT.citraAditya Bakti, Bandung,1993,hal.40.

ataudigunakan juga dalam badan hukum untuk membedakan barang yang satu dengan barang yang lainnya maupun dengan barang yang sejenisnya.

Sedangkan untuk Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa lainnya, merupakan pengertian dari merek jasa dan diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU Merek. Sedangkan untuk merek Kolektif merupakan merek yang di gunakan untuk jasa dan/atau barang dengan sebuah karakteristik yang sama yang diperdagangkan lebih dari satu orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya.

Sehingga dari beberapa pengertian diatas mengenai pengertian merek dapat ditarik kesimpulan bahwa merek merupakan sebuah tanda (*Sign*) untuk membedakan barang-barang yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, yang memiliki daya pembeda atau sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa²².

3. Merek sebagai salah satu Properti

Merek sebagai salah satu properti merupakan sinonim dengan konsep benda atau kebendaan, dalam buku II KUHPerdara Pasal 499 KUHPerdaramemberikan definisinya tentang kebendaan yaitu tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat di kuasai oleh hak milik.

²²Prof.Dr.H. Djakfar Muhammad,S.H.,M.Ag.**Hukum Bisnis membangun wacana integritas perundangan nasional dengan syariah.** UIN-Malang Press, 2009, hal 287

Pengertian dari Pasal 499 KUHPdata tersebut merupakan konsep property atau benda/kebendaan meliputi barang maupun meliputi hak. Istilah barang secara yuridis orientasinya adalah untuk menunjuk benda berwujud, sedangkan segenap hak orientasinya adalah untuk menunjuk segenap benda tak berwujud.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian dari konsep property/benda/kebendaan adalah sangat luas karena mencakup segenap benda berwujud atau tidak berwujud, benda tetap atau bergerak. Perlindungan hukum yang tertinggi dalam hubungan antar benda, objek hukum, dengan subjek hukum adalah melalui konsep hukum yang disebut dengan hak milik²³.

Pasal 570 KUHPdata memberikan perlindungan hukum terhadap suatu properti atau benda yang berhubungan dengan subjek hukum tertentu diikat yang diikat dengan hak milik yaitu:

Hak Milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasarkan ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.

Di banding dengan hak-hak kebendaan lainnya, dapat disimpulkan bahwa hak milik merupakan sebuah hak kebendaan yang paling utama karena pemilik hak mempunyai kebebasan untuk menikmati dan menguasai benda yang dimilikinya dengan sebebaskan-bebasnya. Ada dua konsep dalam hak miliki yaitu *menguasai* dan *menikmati* secara bebas. Penguasaan secara bebas memiliki pengertian dimana pemilik hak dapat melakukan perbuatan hukum apa saja terhadap benda/property yang dimilikinya, bisa saja dengan melakukan

²³ Slamet Kurnia Titon, S.H., M.H. **Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs**. PT. Alumni. Bandung. 2011. hlm 104.

pemeliharaan dengan baik, merubah bentuk ataupun dengan memindah tangankan. Sementara penikmatan secara bebas memiliki pengertian bahwa pemilik hak dapat memakai sepuas-puasnya, memanfaatkan dengan semaksimal mungkin dan dapat memetik hasil sebanyak-banyaknya dari benda/properti tersebut. Kebebasan dalam hal penguasaan dan penikmatan tersebut juga mempunyai pengertian tidak boleh diganggu gugat oleh si pemilik oleh siapapun sejauh si pemilik tersebut melakukannya untuk memenuhi kebutuhan yang wajar.²⁴

Sehingga mengacu akan hal tersebut Merek adalah property dan hukum berfungsi untuk melindungi properti²⁵ dan merek sebagai salah satu benda tak berwujud (*immateriil*) merupakan salah satu jenis Hak Kekayaan Intelektual yang dimasukkan kedalam *industrial property rights*²⁶. Sebagai benda merek salah satu objek yang berhubungan dengan subjek hukum tertentu dan dapat diikat dengan institusi hak, yaitu dengan hak milik maupun dengan hak untuk memakai atau menggunakan dengan persetujuan pemilik

4. Maksud dan Tujuan Pendaftaran Merek

Menurut ketentuan Pasal 3 UU Merek²⁷ tentang merek yaitu:

Hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Sehingga demikian maksud dan tujuannya sebagai sebuah hak eksklusif

merek merupakan hak seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang tidak boleh dikuasai oleh orang lain untuk menggunakannya, jadi apabila ada

²⁴Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, **Hukum Perdata : Hukum Benda**, Yogyakarta, Liberty, 1981. hlm 42-43

²⁵*Ibid.*, hlm. 104

²⁶*Ibid.*, hlm 108

²⁷ Lihat ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek

pihak lain yang ingin menggunakan atau memilikinya, maka harus se-izin pemiliknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Fungsi Merek

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual memaparkan fungsi dari merek itu sendiri, yaitu sebagai berikut²⁸ :

1. Sebagai tanda pengenal untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan yang lainnya (*product identity*). Fungsi ini juga menghubungkan barang atau jasa dengan produsennya sebagai sebuah jaminan reputasi hasil usaha perusahaan ketika telah diperdagangkan.
2. Sebagai salah satu sarana promosi untuk berdagang (*means of trade promotion*). Promosi dilakukan melalui iklan. Merek merupakan salah satu *good will* untuk menarik konsumen, merupakan sebuah simbol seorang pengusaha untuk memperluas jaringan pasar produk atau barang dagangannya.
3. Sebagai jaminan atas mutu barang atau jasa (*quality guarantee*). Karena dalam hal ini menguntungkan pihak pemilik merek dan juga memberikan perlindungan jaminan mutu barang atau jasa bagi konsumen yang telah menggunakan barang dan/atau jasa.
4. Untuk penunjukan atas asal barang atau jasa yang dihasilkan (*source of origin*). Merek merupakan sebuah tanda pengenal asal barang atau jasa yang menghubungkannya dengan produsen atau daerah maupun negara asalnya.

²⁸ Direktorat Jenderal HKI, **Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Pertanyaan & Jawabannya)**, Ditjen HKI Depkeh & HAM, Jakarta, 2000, hal 42.

6. Syarat dan Tata Cara Permohonan Pendaftaran Merek

Permohonan pendaftaran merek harus dilakukan secara tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan mencantumkan:

- a. tanggal, bulan, dan tahun;
- b. nama lengkap, kewarganegaraan dan alamat pemohon;
- c. nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui sebuah kuasa;
- d. warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna;
- e. nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.

Permohonan yang diajukan tersebut harus dilampiri dengan bukti pembayaran biaya oleh pemohon dan ditanda tangani oleh pemohon itu sendiri atau kuasanya. Pemohon dalam hal ini dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama-sama, atau badan hukum, namun apabila dalam melakukan permohonan pendaftaran merek diajukan lebih dari satu pemohon yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, dimana nama semua pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu dari pemohon untuk memilih sebagai satu alamat mereka.

Pemohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu dari pemohon yang berhak atas merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon yang mewakilkan. Apabila hal tersebut dilakukan oleh pemohon dengan diajukan melalui kuasanya (Konsultasi H.K.I), surat kuasa tersebut di

tandatanganinya oleh semua pihak yang berhak atas merek yang ingin di daftarkan tersebut.

7. Jangka Waktu Perlindungan

Prinsip dari perlindungan merek di Indonesia adanya prinsip pendaftaran yang dilakukan oleh pihak yang pertama kali mendaftarkan merek tersebut atau *first to file*. Di dalam UU Merek, bahwa merek diberikan hak oleh negara yang dapat di ajukan oleh perorangan atau badan hukum melalui permohonan pendaftaran merek secara tertulis kepada Direktorat Jenderal H.K.I dan dilengkapi dengan persyaratan administrasi.

Syarat dan tata cara permohonan pendaftaran merek itu di atur dalam pasal 7 sampai Pasal 12 UU Merek. Pasal 3 UUMerek menerangkan bahwa atas hak merek merupakan sebuah hak eksklusif yang telah diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri mereknya atau melisensikan kepada pihak lain yang mempunyai sebuah ikhtikad baik.

Pasal 28 UU Merek mengatur mengenai angka waktu terhadap perlindungan merek terdaftar, yang menyatakan bahwa merek terdaftar mendapatkan sebuah perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang.

Merek yang akan dimintakan perpanjangan pendaftarannya harus dapat menunjukkan bukti bahwa sebuah merek yang bersangkutan masih dapat digunakan dalam barang maupun jasa sesuai yang telah tercantum didalam sertifikat merek. Daftar Kelas Barang²⁹

²⁹ Ibid Miru Ahmadi, Hal 22

Kelas barang	Jenis Barang
Kelas 1	Bahan Kimia yang dipakai dalam Industri, ilmu pengetahuan dan fotografi, maupun dalam perkebunan, pertanian, dan kehutanan: dammar tiruan yang tidak diolah, plastik yang tidak diolah, pupuk; komposisi bahan pemadam api, sediaan pelunak dan pematrasi zat-zat kimia untuk pengawet makanan; zat-zat penyamak; perekat yang digunakan dalam industry.
Kelas 2	Pernis-pernis, cat-cat; lak-lak; bahan pencegah karat dan kelapukan kayu; bahan pewarna; pengering; bahan mentah dammar alam; logam dalam bentuk lembaran dan bubuk untuk para pelukis, dekor, pencetak dan seniman
Kelas 3	Sediaan pemutih dan zat-zat lainnya untuk mencuci; sediaan untuk mengkilatkan, membersihkan, membuang lemak dan menggosok; wangi-wangian; sabun-sabunan, minyak-minyak sari, losion rambut, kosmetik; bahan-bahan pemeliharaan gigi.
Kelas 4	Minyak-minyak dan lemak-lemak untuk industry; bahan pelumas; komposisi zat untuk menyerap, mengikat debu, membasahi dan; bahan bakar (termasuk larutan hasil penyulingan untuk motor) dan bahan penerangan; lilin-lilin, sumbu.
Kelas 5	Sediaan hasil farmasi, saniter dan ilmu kehewanian; makanan bayi, bahan-bahan untuk berpantang makan/diet yang disesuaikan untuk pemakaian medis, bahan-bahan

	pembalut,plester-plester; bahan-bahan untuk menambal gigi, bahan pembuat gigi palsu; pembasmi kuman; sediaan untuk membasmi binatang perusak, tumbuh-tumbuhan dan jamur.
Kelas 6	Logam-logam biasa dan campurannya; bangunan-bangunan dari logam yang dapat diangkut bahan bangunan dari logam; bahan-bahan dari logam untuk jalan kereta api; barang-barang besi, benda-benda kecil dari logam; kabel dan kawat-kawat dari logam biasa bukan untuk listrik; lemari-lemari besi; barang-barang dari besi biasa yang tidak termasuk kedalam kelas-kelas lain; bijih-bijih
Kelas 7	Mesin-mesin dan mesing perkakas; kopeling mesin dan komponen transmisi (kecuali untuk kendaraan darat); motor-motor dan mesin-mesin (kecuali untuk kendaraan darat); perkakas pertanian; mesin penetas untuk telur.
Kelas 8	Alat- alat perkakas tangan (dijalankan dengan tangan);alat-alat pemotong; pisau silet;pedang-pedang.
Kelas 9	Aparat dan instrumen ilmu pengetahuan, pelayaran, geodes,lisrik,fotografi,pemeriksaan(pengawasan),sinematografi , optik, timbangan,ukur,sinyal,penyelamatan dan pendidikan, aparat untuk merekam, mengirim,atau mereproduksi suara atau gambar, disk perekam; mesin-masin otomatis dan mekanisme untuk aparat yang bekerja dengan memasukkan kepingan logam ke dalamnya; mesin hitung, peralatan pengolahan data, mesin kas, computer; aparat pemadam kebakaran

Kelas 10	Aparat dan instrument pembedahan, pengobatan, kedokteran gigi dan kedokteran hewan, kedokteran, anggota badan, gigi palsu, dan mata; benda-benda ortopedik; bahan-bahan untuk penjahitan luka bedah.
Kelas 11	Aparat untuk keperluan pemanasan, penerangan, pengahsilan uap, pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, penyediaan air dan kebersihan.
Kelas 12	Kendaraan-kendaraan; bergerak di darat, udara atau laut
Kelas 13	Senjata-senjata api; amunisi-amunisi dan proyektil; bahan peledak; kembang api; petasan
Kelas 14	Logam-logam mulia secara campuran-campuranya dan benda-benda yang dibuat dari logam mulia atau yang dilapisi dengan bahan itu, yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lainnya; perhiasan; jam dan instrument pengukur waktu.
Kelas 15	Alat music
Kelas 16	Kertas, karton dan barang-barang yang terbuat dari bahan-bahan ini, yang tidak termasuk kelas-kelas lain; barang-barang cetakan; bahan-bahan untuk menjilid buku; potret-potret; alat tulis-menulis; alat-alat kantor (kecuali perabot kantor); perekat untuk keperluan alat tulis menulis atau rumah tangga; bahan pendidikan dan pengajaran (kecuali aparat-aparat); bahan-bahan plastic untuk membungkus (yang tidak termasuk kelas lain); kartu-kartu main; huruf cetak; klise-klise
Kelas 17	Karet, getah, asbes, mika dan barang-barang tersebut terbuat

	dari bahan-bahan ini dan tidak termasuk kelas-kelas lain; plastic-plastik yang sudah berbentuk untuk digunakan dalam pembuatan barang; bahan-bahan untuk membungkus, merapatkan dan menyekat, bukan dari logam, pipa-pipa lentur
Kelas 18	Kulit dan kulit imitasi, dan barang-barang terbuat dari bahan-bahan ini dan tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; kulit mentah kulit-kulit halus binatang; koper-koper dan tas-tas untuk tamasya; payung hujan, payung-payung matahari dan tongkat-tongkat, cambuk-cambuk pelanadan peralatan kuda dari kulit.
Kelas 19	Bahan bangunan; pipa-pipa kaku yang bukan dari logam untuk bangunan; pek,aspal, bitumen; bangunan-bangunan yang dapat dipindah-pindah bukan dari logam; monument-monumen bukan dari logam
Kelas 20	Perabot – perabot rumah, cermin-cermin, bingkai gambar, benda – benda yang tidak termasuk kedalam kelas-kelas lain dari kayu,, rumput, bulun,rotan, tanduk,tulang, balein, kulit kerang,amber, kulit mutiara, tanah liat magnesium dan bahan-bahan penggantinya dari plastic
Kelas 21	Perkakas dan wadah-wadah untuk rumah tangga atau dapur (Bukan dari logam mulia atau yang dilapisi logam mulia);sikat-sikat (kecuali kuas-kuas),sisir-sisir dan bunga-bunga karang; bahan pembuat sikat; kaca yang belum atau setengah dikerjakan (kecuali kaca yang dipakai dalam bangunan);wollbaja;benda-

	benda untuk membersihkan; gelas-gelas, porselin dan pecah beah dari tembikar yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain
Kelas 22	Tali,Tambang, jala-jala, tenda-tenda, kain terpal, tirai, layar-layar,kantong-kantong dan sak-sak (yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain); bahan-bahan pelapis dan pengisi bantal (kecuali dari plastic); serat-serat kasar untuk pertenunan
Kelas 23	Benan yang digunakan untuk tekstil
Kelas 24	Tekstil dan barang-barang tekstil. Yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; meja dan tilam-tilam tempat tidur
Kelas 25	Pakaian, tutup kepala, alas kaki
Kelas 26	Renda-renda dan sulaman-sulaman, pita-pita dan jalinan-jalinan dari pita; kain dan mata kait, kancing-kancing, jarum-jarum pentul dan jarum; bunga-bunga buatan
Kelas 27	Permadani, Karpét-karpét, keset dan bahan anyaman untuk pembuat keset, linoleum dan bahan-bahan lain untuk penutup ubin; hiasan-hiasa gantung dinding (yang bukan dari tekstil)
Kelas 28	Manian-mainan; olahraga dan alat-alat senan yang tidak termasuk kedalam kelas-kelas lain; hiasan pohon natal
Kelas 29	Daging, kain, unggas dan binatang buruan, saripati daging; buah-buahan dan sayuran yang telah diawetkan, dikeringkan dan dimasak; selai;agar-agar;saus; minyak-minya dan lemak-lemak yang dapat dimakan.
Kelas 30	Kopi, teh,gula, beras,tapioca,sagu,kopi buatan; tepung dan sediaan-sediaan terbuat dari gandum; roti, kue-kue dan

	kembang-kembang gula, es konsumsi; air gula, madu; ragi, bubuk pengembang roti/kue; garam. Moster; cuka; saus-saus (bumbu-bumbu);rempah-rempah,es,kecap, tauco,terasi,petis,kerupuk, dan emping
Kelas 31	Hasil-hasil produk pertanian,perkebunan, kehutanan dan jenis-jenis gandum yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; binatang-binatang hidup; sayur segar dan buah-buahan; bening-bening;makanan hewan; tanaman dan bunga-bunga alami;
Kelas 32	Bir dan jenis-jenis bir; air soda, air mineral dan minuman bukan alkohol lainnya; minuman-minuman dari buah dan perasan buah; sirup-sirup
Kelas 33	Minum-minuman keras (kecuali bir)
Kelas 34	Barang-barang keperluan perokok; Tembakau,korek api

B. Perseroan Terbatas

1. Perseroan Terbatas Sebagai Salah Satu Bentuk Perusahaan

Perusahaan pada prinsipnya tidak lain adalah kegiatan yang berupa menjalankan usaha dengan tujuan untuk mencari sebuah keuntungan (*profit oriented*). Dalam menjalankan usahanya perusahaan,tidak terlepas dari masalah permodalan.

Modal merupakan biaya awal yang dibutuhkan untuk membuka atau menjalankan sebuah perusahaan, modal dapat berupa uang, barang, maupun tenaga.

Dalam masyarakat dikenal dan banyak dijumpai bermacam-macam perusahaan, seperti Usaha Dagang (U.D), Perusahaan Dagang (P.D), Perusahaan Otobis (P.O), Firma (F.a), *CommanditerVennootschap* (C.V) atau persekutuan Komanditer, Koperasi, dan Perseroan Terbatas (P.T). KUHPerdara hanya mengenal satu macam jenis perusahaan, yaitu Persekutuan Perdata.SedangkanKUHDagang ada tiga macam Perusahaan yaitu Firma, C.V, dan Perseroan Terbatas.Ditinjau dari kedudukannya, dapat dibedakan perusahaan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum, perusahaan yang tidak berbadan hukum yaitu perusahaan perorangan, persekutuan firma, dan C.V. Sedangkan perusahaan yang berbadan hukum adalah Perseroan Terbatas, dan Koperasi.³⁰ Sehingga Perseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk perusahaan yang berbadan Hukum.

2. Perseroan Sebagai Badan Hukum Lahir Dari Proses Hukum

Pasal 1 angka 1 UUP.T 2007, berbunyi:

“Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”

Melihat dari ketentuan Pasal 1 angka 1 diatas, pokok yang melahirkan sebuah Perseroan sebagai sebuah badan hukum harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:³¹

1. Persekutuan Modal

Sebagai badan hukum sebuah Perseroan memiliki sebuah dasar yaitu “Modal dasar”atau yang di sebut juga dengan *authorized capital*, yaitu jumlah

³⁰Supramono Gatot,S.H.,M.Hum, **Hukum Perseroan Terbatas**.Djambatan. Jakarta, 2009.hlm.2

³¹Ibid.,M. HarahapYahya, Hal 34

modal yang dinyatakan dalam akta pendirian atau dalam anggaran dasar³². Modal tersebut terbagi dalam saham, dan para pemegang saham dalam status mereka sebagai perseroan. Jadi, ada beberapa orang pemegang saham dalam status mereka sebagai anggota perseroan dengan jalan membayar saham kepada perseroan.

2. Didirikan Berdasarkan Perjanjian

Perseroan sebagai badan hukum, didirikan berdasarkan sebuah “Perjanjian” sehingga pendirian perseroan sebagai persekutuan modal di antara pendiri atau pemegang saham, harus terpenuhinya ketentuan hukum mengenai perjanjian yang diatur dalam Buku Ketiga KUHPerdara khususnya Bab kedua, bagian kesatu tentang ketentuan umum perjanjian (Pasal 1313-1319 KUHPerdara) yaitu :

- a. Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih
- b. Suatu perjanjian dapat dibuat dengan secara Cuma-Cuma atau atas beban. Apabila Suatu perjanjian dengan Cuma-Cuma merupakan sebuah perjanjian dengan mana pihak satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa adanya suatu manfaat bagi dirinya sendiri. Sedangkan untuk perjanjian atas beban merupakan suatu perjanjian yang mewajibkan dari masing-masing pihak memberikan sebuahsesuatu,berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu”.
- c. Secara umum tak seorang dapat mengikatkan dirinya sendiri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk

³²Syahrul, S.E.,MuhammadAfniNazar,S.H., Ardiyas, **Kamus Lengkap Ekonomi**, Citra Harta Prima Jakarta, Cetakan Pertama, 2000, hlm. 98.

dirinya sendiri. Akan Tetapi diperbolehkan untuk menanggung atau menjamin seorang pihak ke tiga dengan menjanjikan apakah orang ini akan berbuat sesuatu, dengan tidak mengurangi tuntutan pembayaran ganti rugi terhadap siapa yang telah menggung pihak ketiga itu atau yang telah berjanji, untuk menyuruh pihak ketiga tersebut menguatkan sesuatu, jika pihak ini menolak memenuhi sebuah perikatanya.

- d. Diperbolehkannya untuk ditetapkannyasuatu janji untuk kepentingan seorang pihak ketiga, apabila penetapan janji, yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri, atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain, memuat suatu janji yang seperti itu.
- e. Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu tidak boleh menariknya kembali, apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan hendak mempergunakkanya.
- f. Jika seorang meminta diperjanjikan sesuatu hal maka dianggap bahwa itu adalah untuk ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak daripadanya, kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau dapat disimpulkan dari sifat perjanjian.

Bagian kedua tentang syarat-syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320-1337

KUHPerdata) yaitu:

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Tiada sepakat yang sah apabila sepakat mereka yang mengikatkan pada perjanjian tersebut itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. Namun tetapi Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu perjanjian selain apabila kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian. Kekhilafan itu tidak menjadi sebab kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai dirinya orang dengan siapa seseorang bermaksud membuat suatu perjanjian. Kecuali jika perjanjian itu telah dibuat terutama karena mengingat dirinya orang tersebut. Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat suatu perjanjian merupakan sebuah alasan untuk batalnya perjanjian, dan juga apabila paksaan itu dilakukan oleh seseorang pihak ketiga untuk kepentingan siapa perjanjian tersebut telah dibuat.

Mengenai adanya Paksaan telah terjadi apabila perbuatan itu sedemikian rupa hingga dapat menakutkan seorang yang berfikiran sehat, dan apabila perbuatan paksaan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata.

Paksaan mengakibatkan batalnya suatu perjanjian tidak saja apabila dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuat perjanjian, namun paksaan juga bisa dibatalkan apabila dilakukan terhadap suami atau isteri atau sanak keluarga dalam garis ke atas maupun kebawah. Penipuan juga merupakan sebuah alasan untuk melakukan pembatalan perjanjian, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh seorang satu pihak adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut. Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan”

Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan namun jika ia oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Pasal 1330 KUHPerdara“Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

1. orang yang belum dewasa;
2. mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. orang-orang perempuan, dalam hal yang ditetapkan oleh Undang-undang semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tersebut.

Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian dan sebuah perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya, namun barang-barang yang baru akan dapat dikemudian hari dapat menjadi pokok sebuah perjanjian. Suatu sebab adalah terlarang jika didalam undang-undang dilarang dan berlawanan dengan kesusilaan baik maupun ketertiban umum, serta bagian ketiga tentang akibat-akibat perjanjian (Pasal 1338-1341 KUHPerdara), yaitu:

1. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang telah membuatnya. suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan ikhtikad yang baik.
2. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas yang telah dinyatakan didalam perjanjian akan tetapi mengenai segala sesuatu yang menurut sifat dari perjanjian diharuskan kepatuhan kebiasaan dan undang-undang dan perjanjian tersebut

secara langsung mengikat kepada pihak-pihak yang telah membuat perjanjian tersebut.

Sehingga ditinjau dari segi hukum perjanjian, pendirian perseroan sebagai suatu badan hukum bersifat “Kontraktual” yaitu pendirian perseroan itu lahir dari perjanjian. Selain bersifat kontraktual, pendirian Perseroan itu juga bersifat “Konsensual” yaitu harus adanya kesepakatan untuk mengikat perjanjian pendirian perseroan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU P.T, supaya pendirian Perseroan sah menurut hukum dan undang-undang, pendirian perseroan sedikitnya harus 2 orang atau lebih pemegang saham.

Ketentuan yang digariskan dalam Pasal 7 ayat (1) maupun penjelasan pasal ini, sesuai dengan yang ditentukan Pasal 1313 KUHPerdara. Karena suatu perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana dengan mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap suatu orang atau lebih. Sedangkan Pasal 1320 KUHPerdara merupakan perjanjian pendirian perseroan itu sah, harus memenuhi syarat adanya kesepakatan, kecakapan, untuk membuat suatu perikatan mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Perjanjian itu akan sah, maka mengenai ketentuan Pasal 1338 K.U.H.Perdara, perjanjian pendirian Perseroan itu akan sah dan mengikat sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.

3. Melakukan Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Ketentuan Pasal 2 UU P.T, suatu perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, dan menyambung Pasal 18 UU P.T ditegaskan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha itu, harus

dicantumkan dalam Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan Pasal 18 UU P.T, maksud dan tujuan merupakan sebuah “usaha pokok” Perseroan, sedangkan “Kegiatan Usaha” merupakan kegiatan yang dijalankan oleh sebuah Perseroan yang ditujukan untuk mencapai maksud dan tujuannya untuk kegiatan usaha yang harus dirinci secara jelas dalam Anggaran Dasar, dan rincian tersebut tidak boleh adanya sebuah pertentangan dengan Undang-Undang.

4. Lahirnya Perseroan Melalui Proses Hukum dan Bentuk Pengesahan Pemerintah

Sebuah perseroan sebagai badan hukum merupakan diciptakan melalui sebuah proses hukum yang sesuai dengan peraturan per Undang-undangan yang berlaku. Sehingga perseroan disebut makhluk badan hukum yang berwujud artificial yang diciptakan melalui sebuah proses hukum. Proses kelahiran sebagai badan hukum, mutlak didasarkan melalui Keputusan Pengesahan oleh Menteri. Ditegaskan dalam Pasal 7 (2) UU P.T yang berbunyi :

“Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan”.

Perseroan keberadaannya sebagai badan hukum dibuktikan berdasarkan Akta Pendirian yang telah tercantum didalam Anggaran Dasar Perseroan, apabila dalam Anggaran Dasar telah mendapatkan pengesahan oleh Menteri maka Perseroan tersebut menjadi sebuah subjek hukum korporasi.

Sifat dari Perseroan sebagai subjek hukum adalah secara terus menerus atau abadi, karena mengenai jangka waktunya dalam Anggaran Dasar tidak ditentukan mengenai jangka waktu batasnya sehingga boleh dikatakan

keberadaannya tidak ada jangka waktunya. Bahkan apabila dalam Anggaran Dasar ditentukan mengenai waktu berdirinya tak mengurangi mengenai jangka waktu tersebut, karena pengalihan maupun berhentinya pemegang saham dan diberhentikannya maupun digantinya Anggota Direksi maupun karyawan perseroan, tidak mempengaruhi dan tidak menimbulkan akibat terhadap kelanjutan hidup dan eksistensi dari perseroan tersebut.³³

Perseroan sebagai sebuah subjek hukum artificial yang diakui oleh negara menjadi sebuah badan hukum memang tidak bisa dilihat maupun diraba. Akan tetapi eksistensinya perseroan sebagai badan hukum secara riil ada sebagai subjek hukum yang terpisah dan secara bebas dari pemegang saham atau pemiliknya maupun oleh pengurus dalam hal Direksi dari perseroan.

Perseroan melalui pengurus dapat melakukan sebuah perbuatan hukum seperti melakukan kegiatan dan atas nama perseroan membuat perjanjian, transaksi, menjual asset maupun perbuatan lainnya dalam hal menggugat maupun digugat.

3. Maksud dan Tujuan Perseroan

Tentang maksud dan tujuan dari perseroan itu didirikan dijelaskan dalam Pasal 2 UU P.Tyaitu :

“Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesejahteraan”

Sehingga perseroan itu harus mempunyai maksud dan tujuan mengenai kegiatan usaha yang dijalankan oleh perseroan dengan jelas dan tegas.

³³Rutzel MSJD cs, *Contemporary Business Law, Fourth Edition*, McGraw Hill, Publishing Company, 1990, Hlm.821.

- 1) Pencantuman Maksud dan Tujuan dalam Anggaran Dasar Perseroan bersifat Imperatif

Pencantuman mengenai maksud dan tujuan dalam kegiatan usaha Anggaran Dasar dilakukan secara bersamaan saat pembuatan Akta pendirian Perseroan. Penempatan mengenai maksud dan tujuan kegiatan usaha dalam Anggaran Dasar bersifat Imperatif dijabarkan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c Undang-undang Perseroan Terbatas mengenai “pengesahan” badan hukum perseroan.

Perseroan harus mengajukan permohonan kepada Menteri dengan mengisi formulir isian yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. nama dan tempat kedudukan perseroan;
- b. jangka waktu berdirinya perseroan;
- c. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan.

- 2) Pencantuman Maksud dan Tujuan Memegang Fungsi Prinsipal

Pencantuman mengenai maksud dan tujuan dalam kegiatan usaha Anggaran Dasar perseroan memegang peranan “Fungsi prinsipal” karena pencantuman dalam Anggaran Dasar merupakan landasan hukum bagi pengurus perseroan, dalam hal ini Direksi dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pengelolaan kegiatan Perseroan yang dijalankan, sehingga pada setiap transaksi yang mereka lakukan tidak menyimpang dari maksud dan tujuan yang telah ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan tersebut.

Maksud dan tujuan kegiatan Usaha dalam Anggaran Dasar itu :

- a. melindungi pemegang saham sebagai investor dalam perseroan.

Pemegang saham yang menanamkan modalnya atau uangnya dengan

cara membeli saham perseroan, berhak mengetahui untuk apa uang yang telah diinvestasikan itu dipergunakan.³⁴

- b. mengetahui maksud dan tujuan serta kegiatan usaha pemegang saham sebagai investor akan yakin, pengurus perseroan yakni Direksi tidak akan melakukan kontrak atau transaksi maupun tindakan yang bersifat “spekulatif” mengadu untung di luar tujuan yang telah diatur di dalam ketentuan Anggaran Dasar.³⁵
- c. Direksi tidak melakukan transaksi yang berada diluar kapasitas mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang disebut dalam Anggaran Dasar yang bersifat *Ultra vires*.³⁶

Sehingga maksud dan tujuan itu merupakan sebuah landasan bagi seorang Direksi mengadakan kontrak dan transaksi bisnis, serta sekaligus menjadi sebuah dasar menentukan batasan kewenangan seorang Direksi melakukan kegiatan usahanya.

Apabila seorang Direksi melakukan sebuah tindakan pengurusan diluar batas yang ditentukan dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, maka Direksi tersebut dikategorikan telah melakukan perbuatan *Ultra Vires*. Sehingga dalam hal demikian memberikan hak kepada pemegang saham untuk mengajukan gugatan terhadap Perseroan di pengadilan.

3) Cara Merumuskan Maksud dan Tujuan

Menurut James D.Cox cs³⁷ dikatakan terdapat teori mengenai perumusan maksud dan tujuan perseroan. Pertama mengenai “Teori Konsesi” menurut teori

³⁴*Ibid*, Harahap Yahya, hal 62

³⁵Andrew Hicks & sh Goo, **Cases & Materials On Company Law, Blackstone Prees Limited**, 1994, hlm 124.

³⁶Charlesworth and Morse, **Company Law ELBS, fourteenth Edition**, 1991, Hlm 70.

ini kegiatan dalam Anggaran Dasar harus dicantumkan beberapa kegiatan usaha atau garis bisnis yang definitif. Perumusan maksud dan tujuan diisyaratkan bersifat secara “spesifik” untuk satu bidang kegiatan usaha tertentu yang tidak bercorak implisit.

Mengenai Teori kedua yaitu “Fleksibel” yaitu menurut teori ini Anggaran Dasar dapat mencantumkan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang bersifat sederhana. meliputi kegiatan usaha tanpa mengelaborasi lebih lanjut masing-masing bidang. Akan tetapi meskipun perumusannya bersifat sederhana dan fleksibel, namun bidangnya harus pasti.

Namun ada juga yang berpendapat, mengenai tujuan Perseroan dapat mencakup berbagai bidang kegiatan usaha atau bisnis. Dapat mencakup ruang lingkup bisnis yang luas sesuai dengan kesepakatan para pendiri dari Perseroan.³⁸ Pencantuman mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha pada dasarnya mengandung unsur adanya untung maupun rugi.

Keuntungan menurut H.M.N Purwosutjipto, S.H., apabila di belakang hari Perseroan hendak mengubah objek kegiatan usahanya, tidak perlu mengubah Anggaran Dasar. Oleh karena itu, beliau berpendapat, sebaiknya tujuan Perseroan dirumuskan secara luas, sehingga tidak perlu setiap kali mengubah Anggaran Dasar.³⁹

4) Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha yang Dilarang

Pasal 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 telah membatasi mengenai maksud dan tujuan mengenai kegiatan usaha

³⁷Corporation, **Aspen Law and Business**, 1997, Hlm.50.

³⁸A. James Barros JD cs, **Law For Business Law**, Irwin, Boston, 1991, hlm 419.

³⁹ H.M.N Purwosutjipto, S.H., **Pengantar Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia**, Jilid 2, Djambatan, Hlm.99

Perseroan.Pembatasan itu berisi sebuah larangan, sehingga tidak boleh bertentangan dengannya yaitu:

- (1) tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum;
- (3) tidak bertentangan dengan kesusilaan.

Mengenai permasalahan yang pertama tidak menimbulkan permasalahan, sedangkan mengenai ketertiban umum dan kesusilaan sangat berpotensi menimbulkan sebuah permasalahan.

- 5) Perubahan Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha, Termasuk Perubahan Anggaran Dasar yang Harus Mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Perubahan maksud dan tujuan dari perseroan dan kegiatan usahanya, yang menyebabkan berubahnya Anggaran Dasar yang memerlukan adanya keputusan Persetujuan dari Menteri. Sehingga, agar maksud dan tujuan kegiatan usaha sah secara hukum harus memenuhi syarat dan tata cara yang telah di atur dalam Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 88 ayat (1) UU PT.

Perubahan Disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (Pasal 88 Ayat 1) dengan syarat:

- a. RUPS dihadiri atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
- b. Keputusan sah jika disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ bagian dari jumlah secara yang dikeluarkan keculli Anggaran Dasar menentukan kuorum

kehadiran dan/atau ketentuan pengambilan keputusan yang lebih besar.

Apabia Kuorum Tidak Tercapai Dapat Diselenggarakan RUPS Kedua (Pasal 88 ayat 3) dengan syarat:

- a. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit 3/5 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
- b. Keputusan sah jika disetujui paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah secara yang dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar menentukan kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan yang lebih besar.

6) Ketentuan Hukum yang Berlaku Bagi Perseroan

Mengenai ketentuan yang berlaku bagi perseroan diatur pada pasal 4 Undang-undang Perseroan Tahun 2007 yang berbunyi:

“Terhadap perseroan berlaku undang-undang ini, anggaran dasar perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Selain dari UU PT, Anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain tidak mengurangi kewajiban setiap perseroan untuk menaati asas “ikhtikad baik”, asas “kepatutan”. Dari prinsip “tata kelola Perseroan yang baik” dalam menjalankan Perseroan; Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, meliputi semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keberadaan dan jalannya Perseroan, termasuk peraturan pelaksanaanya, antara lain peraturan perbankan, asuransi, peraturan lembaga keuangan.

4. Ketentuan Hukum yang Mengikat terhadap Perseroan

Apabila dalam ketentuan Pasal 4 UU P.T di kaitkan dengan penjelasan dari pasal tersebut, urutan hukum yang berlaku dan secara mengikat kepada Perseroan yaitu :

- a) Undang-undang Perseroan Terbatas sebagai ketentuan dan sekaligus aturan Pokok Perseroan,
- b) Anggaran Dasara Perseroan (A.D);

Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan jalannya perseroan, meliputi;

- a) Peraturan Pemerintah tentang tata cara pengajuan dan pemakaian nama perseroan (Pasal 9 ayat 4).
- b) Peraturan Menteri tentang tata cara Pengajuan Permohonan Keputusan Pengesahan Perseroan Memperoleh Status Badan Hukum (Pasal 11)
- c) Peraturan Menteri tentang Ketentuan Daftar Perseroan (Pasal 29 ayat 5)
- d) Peraturan Pemerintah Perubahan Besarnya Modal Perseroan (Pasal 32 ayat 3).
- e) Peraturan Pemerintah Besarnya jumlah Nilai keuangan Persesroan yang wajib diserahkan Laporan oleh Direksi kepada Akuntan Publik (Pasal 68 ayat 1)
- f). Peraturan Pemerintah tentang tanggung Jawab Sosial dan lingkungan (Pasal 74 ayat 4)
- g) Peraturan Pemerintah tentang penggabungan, Peleburan, atau Pengambil alihan (Pasal 134)

- h) Peraturan Pemerintah tentang pemisahan Perseroan (Pasal 136)
- i) Peraturan Pemerintah tentang memperoleh Salinan (Pasal 156 ayat 2)
- j) Peraturan Menteri tentang kewenangan, susunan Organisasi dan Tata cara kerja Tim Ahli (Pasal 156 ayat 4)

Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan jalannya Perseroan di luar Peraturan Pelaksanaanya:

- a) Peraturan Perundang-undangan perbankan.
- b) Peraturan Perundang-undangan peransuransian
- c) Peraturan Perundang-undangan lembaga keuangan.

5. Asas-asas Hukum

Menyingung penjelasan dari Pasal 4 UU P.T, dimana setiap Perseroan harus menaati asas-asas hukum yang terdiri atas:

- a) Asas Iktikad baik (*tegoedertrouw*, *good faith*, *bonafide*) dalam Pasal 1338 K.U.H.Perdata ayat 3 menyebutkan jika:

“Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Dalam pasal ini memberikan sebuah pemahaman bahwa perjanjian yang akan dihasilkan atau di sepakati oleh para pihak harus dilaksanakan sesuai dengan kepatutan dan keadilan.

- b) Asas Kepatutan (*redelijkheid en billijkheid*, *reasonableness and fairness*)Asas Kepatutan tertuang didalam Pasal 1339 K.U.H.Perdata,

Asas ini berkaitan dengan isi dari perjanjian , yang berbunyi :

“Suatu Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”

Maksud dari bunyi Pasal 1339 K.U.H.Perdata dapat ditarik kesimpulan bahwa jika berhadapan dengan kekosongan perjanjian yang dibuat, maka ke dalam kekosongan tersebut dapat ditambahkan segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian telah diharuskan menurut kepatutan, kebiasaan, ataupun undang-undang.

c) Prinsip tata kelola Perseroan yang baik (*good corporate governance*).

Penerapan prinsip tata kelola yang baik dalam sebuah perusahaan sangatlah penting sebagai salah satu proses untuk menjaga kesinambungan usaha perusahaan dalam jangka panjang yang ingin mengutamakan kepentingan para pemegang saham dan pemangku kepentingan. Sehingga tujuannya agar mendorong Organ Perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dalam Anggaran dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertanggung jawab kepada Para pemangku kepentingan.

6. Direksi

Sesuai ketentuan Pasal 1 ayat 2 UU P.T salah satu organ Perseroan adalah Direksi. Sebagai bagian organ perseroan Direksi mempunyai kedudukan, kewenangan dan kewajiban seperti menjalankan kepengurusan Perseroan dan kapasitas mewakili Perseroan.

Untuk menjadi Direksi sebuah Perseroan, maka dengan melihat ketentuan dalam Pasal 93 ayat (1) UU P.T terdapat 2 macam persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi Direksi, persyaratan tersebut berupa Persyaratan Pokok dan Persyaratan tambahan.

Persyaratan pokok merupakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum, dilihat dari Pasal 1330 K.U.H.Perdata, orang yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum dapat dilihat dari segi usia dan juga segi kesehatan jiwa, dan jika dilihat dari kategori dewasa merupakan seseorang yang telah mencapai umur 18 Tahun.

Sedangkan persyaratan tambahan, bahwa calon anggota direksi yang bersangkutan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dilakukan pengangkatan tidak pernah dinyatakan pailit, menjadi anggota direksi ataupun menjadi anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah yang dapat menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dan dihukum karena melakukan tindakan pidana yang merugikan keuangan negara atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

7. Aset Perseroan Terbatas

Sebuah Perseroan Terbatas merupakan sebuah persekutuan modal, sehingga perseroan dari awal harus memiliki modal, sehingga mempunyai biaya untuk menjalankan usaha Perseroannya tersebut, modal perseroan berasal dari pendirian perseroan, karena setiap pendiri wajib mengambil bagian saham pada perseroan pada saat didirikan⁴⁰.

Mengenai modal dalam Perseroan Terbatas dikenal ada 3 (tiga) macam, yaitu modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang disetor. Pasal 15 ayat (1) huruf d diatur mengenai modal Perseroan Tersebut dan harus disebutkan dalam akta pendirian perseroan.

⁴⁰Supramono Gatot, S.H., M.Hum, *ibid.* hal 88

1. Modal Dasar

Dalam Undang-undang Perseroan Terbatas tidak memberikan pengertian mengenai modal dasar, namun mengacu pada pendapat para penulis yaitu Hadhikusuma,dkk dan Soemitro⁴¹ bahwa modal dasar adalah jumlah modal yang disebut dalam akta pendirian dan besarnya jumlah yang tercantum dalam akta tersebut merupakan jumlah maksimum modal dasar perseroan.

Modal dasar dalam Perseroan merupakan modal awal yang dimiliki oleh perseroan pada waktu pertama kali perseroan didirikan. Modal dasar harus ada dan wajib tercantum pada akta pendirian perseroan, perjanjian yang dilakukan oleh para pendiri bersifat tertulis.

Modal perseroan terbagi atas sejumlah saham, hal itu termuat didalam pasal 31 ayat 1 UU PT.

2. Modal yang ditempatkan

Purwosutjipto mengatakan bahwa modal yang ditempatkan adalah⁴² modal yang disanggupi oleh para pendiri dan pemegang saham. Sedangkan menurut Soemitro⁴³ modal yang ditempatkan pada waktu pendirian perseroan merupakan jumlah ikut sertanya para persero pendiri.

3. Modal yang disetor

Mengenai modal yang disetor secara tidak langsung sudah disinggung mengenai modal yang ditempatkan, dimana modal yang ditempatkan sebenarnya merupakan bagian dari modal dasar, karena jumlah dari anggaran modal dasar itu

⁴¹Hadhikusuma,SR danSumantoro, **Pengertian Pokok Hukum Perusahaan**, CV.Rajawali, Jakarta,1992

⁴²Purwosutjipto HNM, **Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia** 2, PT.Djambatan,Jakarta,1980.hal.105

⁴³Soemitro, **Hukum Perseroan Terbatas,Yayasan dan Wakaf**, PT.Eresco,Bandung.1993.hal23

sebagian ditempatkan sebagai modal yang nyata pada waktu pendirian perseroan. Menurut Pasal 33 ayat (1) UU P.T modal yang ditempatkan harus disetor penuh. Penyetoran tersebut dilakukan dan ditandatangani dihadapan Notaris.

Setelah dilakukan penyetoran, jika masih ada sisa maka kewajiban para pendiri untuk melunasinya kepada perseroan, dimana sisa modal yang di masukkan merupakan modal yang disetor.

Penyetoran modal dilakukan dengan bukti penyetoran secara sah, yaitu bukti setoran dari penerima setoran yang sah dilakukan secara langsung ke Perseroan, maka akan mendapatkan bukti tanda terima (kwitansi) dari bedahara Perseroan.

Jadi sebuah perseroan terbatas, untuk modalnya harus sudah beres sampai dengan perseroan memperoleh pengesahan dari menteri. Para pendiri selaku pemegang saham tidak lagi ada utang kepada perseroan setelah perseroan tersebut berbadan hukum, dengan modal yang telah terkumpul 100% maka modal tersebut milik perseroan sebagai modal awal perseroan.⁴⁴

Perseroan Terbatas merupakan persekutuan modal, dimana harta dari Perseroan Terbatas terpisah dari harta Pribadi dari pemegang saham. Dalam pasal 34 UU P.T menjelaskan :

- 1) Penyetoran atas Modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya;
- 2) Dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian setoran modal saham

⁴⁴Supramono Gatot, S.H., M.Hum, *ibid*, hal 92

ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan perseroan;

- 3) Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah R.U.P.S memutuskan penyetoran saham tersebut.

Para pendiri Perseroan Terbatas maupun calon pemegang saham dalam Perseroan tersebut ketika menyetorkan modal bisa, dalam bentuk uang tunai, asset, maupun *good will* (kecakapan/nama baik).

Asset merupakan sebuah benda, dimana kita mengenal dengan istilah subject hak yaitu mengenai badan pribadi atau *persoon* maka object hak tersebut dinamakan dengan “benda”.

Badan pribadi merupakan orang maupun badan hukum, juga terdapat benda sama halnya yang merupakan benda pertama-tama yaitu barang yang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indra tapi barang yang tak berwujud termasuk termasuk benda juga.

Pengertian akan benda⁴⁵ menurut ilmu pengetahuan adalah segala sesuatu yang menjadi objek hukum sedangkan dalam Pasal 499 KUHPdata menjelaskan

⁴⁵ Lihat Muchsin, **Ihtisar Hukum Indonesia**, Badan Penerbit Iblam, 2005, hlm 61-62. Menurut bentuknya benda dapat dibagi menjadi dua yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 503 KUHPdata yang menyatakan bahwa tiap-tiap kebendaan adalah berwujud atau tidak berwujud. Sedangkan ketentuan Pasal 504 KUHPdata membagi benda berdasarkan sifatnya yaitu benda bergerak atau benda tidak bergerak. Benda bergerak adalah benda yang apabila karena dipakai menjadi habis, atau dapat dikatakan bahwa benda bergerak adalah benda yang dapat dilakukan pindah tangankan dari satu tempat ke tempat lain misalnya: meja, pulpen. Benda tak bergerak menurut sifatnya adalah benda yang tak dapat dipindahkan, misalnya tanah, pohon.

Hak kebendaan dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan, misalnya, hak eigendom
2. Hak kebendaan yang memberikan jaminan, misalnya : hipotik dan hak gadai

mengenai pengertian akan benda itu sendiri secara yuridis yaitu segala sesuatu yang dapat menjadi object *eigendom* (hak milik).

Menurut ketentuan yang diatur didalam K.U.H.Perdata, benda dapat dibedakan sebagai berikut⁴⁶: barang-barang yang berwujud (*lichamelijk*) dan barang-barang yang tak berwujud (*onlichamelijk*). Barang-barang yang bergerak dan barang yang tidak bergerak, barang yang tidak habis dipakai (*onverbruikbaar*) dan barang yang dapat dipakai habis (*verbruikbaar*). Barang-barang yang sudah ada (*tegenwoordigezaken*) dan barang yang masih akan ada (*toekomstigezaken*).

Benda tak bergerak :

1. Benda tak bergerak menurut sifatnya seperti tanah dan segala sesuatu yang melekat diatasnya
2. Benda tak bergerak karena tujuannya, seperti mesin alat-alat yang dipakai didalam pabrik.
3. Benda tak bergerak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, benda ini berwujud hak-hak atas benda-benda yang tak bergerak misalnya hak memungut hasil dari benda tak bergerak, memakai hak atas benda tak bergerak.

Benda Bergerak :

- 1) Menurut sifatnya Benda bergerak diatur dalam 509 K.U.H.Perdata adalah benda yang dapat dipindahkan seperti meja, kursi maupun benda yang dapat pindah dengan sendirinya seperti ternak.
- 2) Benda bergerak karena ketentuan undang-undang menurut pasal 511 K.U.H.Perdata ialah hak-hak atas benda yang bergerak misalnya: hak

⁴⁶Prof.Dr.Ny.Masjchoen Sofwan Sri Soedewei, S.H., **Hukum Benda: Hukum Benda, Liberty**, Jogjakarta, 1981, hal 19

memungghasil (*vruchtgebruik*) atas benda bergerak, hak pemakaian (*gebruik*).

4. Perdamaian

WirjonoProdjodikoro, mengemukakan bahwa dalam K.U.H.Perdata atau BW dalam title 18 dari Buku ke-3 mengatur mengenai suatu persetujuan yang bersifat menghentikan suatu keraguan mengenai suatu perhubungan hukum antara kedua belah pihak (*Vaststellingsovereenkomst*). Persetujuan dalam K.U.H.Perdata dinamakan dengan "*dading*".⁴⁷

Dalam bahasa Belanda, kata "*dading*" di tejemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi sebuah perdamaian, musyawarah.

Perdamaian merupakan sebuah penghentian permusuhan. Damai artinya tidak bermusuhan, berbaik kembali, keadaan tidak bermusuhan, tentramaman. Berdamai, artinya berbaik kembali, berunding untuk menyelesaikan sebuah perselisihan. Mendamaikan maupun memperdamaikan, artinya menyelesaikan permusuhan supaya mendapatkan persetujuan dengan merundingkan.⁴⁸

Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864 K.U.H.Perdata, dijelaskan mengenai pengertian perdamaian, yaitu merumuskan bahwa Perdamaian merupakan sebuah persetujuan dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menahan atau menjanjikan sebuah barang, dimana untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun untuk mencegah timbulnya suatu perkara.

⁴⁷WirjonoProdjodikoro, **Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu**, Vorkink-van Hoeve. Bandung. 1959, hal. 152

⁴⁸ W.J.S. Poerwadarminta, **Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga. Diolah Kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional**. Balai Pustaka. Jakarta. hal. 259.

Subekti merumuskan bahwa Perdamaian merupakan sebuah perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak, dimana dengan tujuan untuk mengakhiri sebuah perkara yang sedang dalam proses, atau untuk mencegah timbulnya sebuah perkara. menurut Subekti, perdamaian merupakan perjanjian formal, dimana diadakan menurut suatu formalitas tertentu, bila tidak maka perdamaian tersebut tidak mengikat dan tidak bersifat sah.⁴⁹

Pasal 1851 K.U.H. Perdata *dading* merupakan sebuah perjanjian dimana para pihak yang ada didalam perjanjian perkara perdata yang sedang berlangsung atau sedang diperiksa oleh hakim atau yang akan diajukan di muka hakim di berhentikan dengan menyerahkan, menahan atau menjanjikan sebuah benda.

8. Teori Ilmu Hukum Normatif

Untuk mengetahui apa yang akan dilakukan oleh pengadilan, ilmu hukum sosiologis harus mempelajari mengenai perbuatan nyata dari pengadilan agar mendapatkan sebuah “Peraturan” yang nyata benar-benar menentukan. Secara a priori tampak sangat mungkin apabila peraturan-peraturan umum ini (perbuatan nyata dari sosiologis) bisa sangat berbeda dari norma-norma umum yang dilahirkan dari undang-undang dan kebiasaan (dari Normatif). Perbedaan tersebut bukan hanya menyangkut mengenai makna dari pernyataan-pernyataan tersebut akan tetapi menyangkut juga dengan isi-isinya, boleh jadi menurut Peraturan-peraturan yang secara nyata dibuat oleh sosiologi , pengadilan menunjukkan perbuatan yang sepenuhnya berbeda dari perbuatan yang diperlihatkan menurut peraturan tertulis yang digambarkan oleh Ilmu hukum Normatif.⁵⁰

⁴⁹Subekti, **Aneka Perjanjian cetakan kesepuluh**. PT. Citra Aditya Bakti. Jakarta. 1995. Hal. 177-1778

⁵⁰Hans Kelsen, **Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif**, Rimdi Press, Jakarta, hal 173.

Ilmu hukum Normatif menegaskan mengenai validitas suatu norma, dan berarti eksistensinya jika sebuah norma tersebut termasuk ke dalam suatu tata hukum yang secara keseluruhan efektif, yakni norma-norma dari tata hukum ini ditaati oleh subyeknya, dan jika tidak maka pada umumnya akan diterapkan oleh organ-organnya.

Norma yang dianggap valid oleh hukum normatif adalah norma yang pada umumnya ditaati atau diterapkan.⁵¹ Menurut penafsiran Ilmu Hukum Normatif pernyataan seorang subyek A diwajibkan oleh hukum untuk berbuat sesuatu, jika A tidak melakukan menurut suatu cara tersebut berarti maka organ masyarakat X harus memberikan sebuah sanksi kepada A. namun suatu organ masyarakat hukum harus melaksanakan sebuah sanksi jika norma yang menetapkan sanksi termasuk ke dalam suatu tata hukum yang efektif.

Pernyataan seorang subyek A mempunyai sebuah hak untuk melakukan perbuatan tertentu kepada subyek B, dalam ilmu hukum Normatif subyek hukum B dalam hal tidak melakukan perbuatan tersebut dan A mengajukan gugatan terhadap B, maka sebuah organ masyarakat X harus melakukan sebuah sanksi kepada B (atau subyek A mempunyai kemungkinan hukum untuk menggerakan sebuah prosedur hukum yang melahirkan sebuah sanksi kepada B) namun jika A mempunyai kemungkinan factual berbuat demikian. Hal ini merupakan sebuah konsekuensi yang tidak dapat dihindarkan karena suatu tata hukum tersebut secara keseluruhan bersifat efektif yakni hanya jika ada suatu derajat tertentu bahwa sanksi-sanksi yang ditetapkan oleh tata hukum tersebut akan benar-benar dilaksanakan dengan kondisi-kondisi yang diantisipasi oleh tata hukum itu sendiri.

⁵¹ Ibid, Hal 174

9. Wajib Daftar Perusahaan

Kemajuan dan peningkatan dalam era global seperti sekarang ini menjadikan perkembangan kegiatan perekonomian khususnya dunia usaha dan perusahaan semakin berkembang. Sehingga memerlukan adanya Daftar Perusahaan sebagai sebuah sumber informasi resmi untuk pihak-pihak yang berkepentingan mengenai identitas akan sebuah perusahaan tersebut.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 1982 mengatur mengenai Wajib Daftar Perusahaan (Untuk selanjutnya disebut U.U.W.D.P) merupakan sebuah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewajiban pendaftaran bagi perusahaan di seluruh Negara Kesatuan Indonesia.

Wajib daftar Perusahaan menurut Pasal 1 U.U.W.D.P adalah

“Daftar Catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan dengan ketentuan Undang-undang ini dan atau peraturan – peraturan pelaksanaannya, yang memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan”

Perusahaan merupakan setiap badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan dilakukan secara terus menerus yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia sebagai tujuan untuk memperoleh sebuah keuntungan atau laba. Daftar Perusahaan bertujuan untuk mencatat mengenai keterangan secara benar dari perusahaan tersebut dan sebagai sumber informasi secara resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai data, identitas, serta mengenai keterangan lainnya yang tercantum dalam Daftar Perusahaan dalam rangka menjamin adanya kepastian berusaha.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan sebuah proses dengan tujuan untuk menemukan sebuah aturan hukum, prinsip hukum serta doktrin-doktrin para ahli untuk menjawab sebuah isu hukum yang sedang terjadi. Menurut J.Potman dalam Dyah Ochtorin dan A'an Efendi, sebuah penelitian hukum digunakan untuk melakukan studi, mengidentifikasi, mengumpulkan data, menginterpretasi dan memberikan sebuah pemahaman yang mendalam mengenai sebuah konsep hukum atau peristiwa pada saat ini, lalu memecahkan sengketa hukum yang timbul tersebut⁵². Sebuah penelitian hukum normative berawal dari tidak jelas sebuah norma, karena adanya kekaburan makna dari norma, kekosongan norma atau adanya pertentangan norma (konflik norma)⁵³

Penelitian melalui metode normatif dalam penulisan ini digunakan penulis akan membahas mengenai Kepemilikan Merek Perseorangan yang dipergunakan dalam Perseroan Terbatas (Analisis Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Niaga Surabaya dalam kasus Merek GOOD DAY) (Studi Putusan Nomor: 08/HKI.MEREK/2014/PN.NIAGA.SBY).

B. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statuta Approach*)

Suatu penelitian normatif sudah tentu menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena hal yang diteliti mengenai hukum yang

⁵² Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, **Penelitian Hukum (*Legal Research*)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.4

⁵³ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2001, hlm.41

menjadi sebuah fokus sekaligus sebagai tema sentral suatu penelitian.⁵⁴

Dalam penelitian ini akan dikaji mengenai peraturan perundang-undangan Nomor 15 Tahun 2001 mengenai Merek serta mengenai Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus mengenai penelitian normatif dilakukan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Kasus tersebut bermakna empiris, namun suatu penelitian normatif dalam kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh mengenai gambaran terhadap dampak dimensi pedoman dalam suatu atauran hukum dalam praktik hukum, serta mengunkana hasil analisisnya untuk bahan masuka dalam eksplanasi hukum.⁵⁵ Dalam penelitian ini putusan yang akan dikaji adalah Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor: 08/HKI.MEREK/2014/PN.NIAGA.SBY

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan didaam penelitian ini adalah :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer digunakan yaitu mengenai bahan-bahan atau aturan-aturan hukum yang mengikat dan diurut secara hierarki. Bahan hukum primer ini merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif sehingga adanya otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-

⁵⁴ Jonny Ibrahim, *Teori& Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang, 2007, hlm.302

⁵⁵ *Ibid*, hlm 321

undangan dan putusan-putusan hakim.⁵⁶ Adapun yang menjadi bahan hukum dari penelitian ini adalah:

- a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia, khususnya Pembukaan UUD 1945;
- b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)
- c. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
- d. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- e. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
- f. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek;
- h. Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 08/HKI.MEREK/2014/PN.NIAGA.SBY

2. Jenis Bahan Hukum Sekunder

Jenis bahan hukum sekunder yaitu mengenai bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer.⁵⁷ Jenis Bahan hukum sekunder ini merupakan bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin)⁵⁸ maupun semua publikasi mengenai hukum

⁵⁶ Ibid, hlm 141.

⁵⁷ Ronny Hanitijo, **Metodologi Penelitian Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, Hlm.25

⁵⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, halm.43

yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yang bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan- bahan hukum primer, sebagai contohnya yaitu dari buku-buku, bulletin maupun dari Internet.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Tenknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini menggunakan studi kepustakaan bahan hukum yang diperlukan dan kemudian akan diklasifikasian untuk menganalisis dan menjawab mengenai permasalahan yang diperoleh pada Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (P.D.I.H) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, koleksi pribadi serta penelusuran internet.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis dengan menggunakan Penafsiran Hukum (*Interpretasi Hukum*) Sudikno Mertokusumo menyamakan mengenai pengertian penemuan hukum dengan penafsiran Hukum, bahwa penemuan hukum dilakukan dengan menggunakan metode penafsiran (*interpretasi*)⁵⁹. Penafsiran hukum menjadi bagian dari penemuan hukum, penafsiran hukum menjadi metode penemuan hukum yang digunakan untuk melakukan penerapan hukum (*das sollen*) pada peristiwa konkrit (*das sein*).

⁵⁹Mertokusumo Sudikno, **Penemuan Hukum**, Liberti, Yogyakarta, 2009 hal 56.

Tujuan penulis penggunaan metode penafsiran hukum untuk membuat gambaran secara sistematis, akurat dan faktual terhadap fakta-fakta, sifat, maupun mengenai hubungan antar fenomena yang ditimbulkan untuk mendapatkan sesuatu pemecahan. Setelah dilakukan proses analisis, dilakukan proses sintesis yaitu dengan menarik serta menghubungkan dengan rumusan masalah, tujuan penulisan serta pembahasan yang akan dilakukan. Sehingga akan ditarik sebuah kesimpulan, serta akan direkomendasikan beberapa hal sebagai upaya transfer gagasan atau ide.

F. Definisi Konseptual

Dalam Penelitian ini yang dimaksud dengan :

- a. Merek adalah Tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki sebuah daya pembeda dan dapat digunakan dalam kegiatan perdagangan baik perdagangan barang maupun perdagangan jasa.
- b. Hak Milik adalah hak yang timbul karena adanya sebuah kepemilikan dari sebuah benda, baik benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak
- c. Perseorangan adalah pembawa hak dan kewajiban dalam hukum untuk melakukan perbuatan Hukum, namun perbuatan tersebut harus disertai dengan kecakapan dan kewenangan Hukum.
- d. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan sebuah kegiatan usaha yang modal dasarnya

terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan undang-undang dan peraturan pelaksanaanya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kepemilikan Merek Perseorangan Yang Digunakan Dalam Perseroan Terbatas Terbukti Bertentangan Dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Dan Kepemilikan Merek Perseorangan Yang Digunakan Dalam Perseroan Terbatas Bertentangan Dengan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007

Di dalam Hukum Perdata istilah orang atau *person* menunjuk kepada pengertian subjek hukum yaitu pembawa hak dan kewajiban. Subjek hukum terdiri atas manusia (Natuurlijk Person⁶⁰) dan Badan hukum (Rechts Person)⁶¹.

Orang dan badan hukum sebagai pelaksanaan hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum dalam melakukan perbuatan hukum badan hukum diwakili dengan para pengurusnya.

Orang yang dapat melakukan perbuatan hukum harus sudah dewasa, dewasa menurut K.U.H.Perdata berumur 21 tahun atau sudah melakukan

⁶⁰ Lihat Komariah, **Hukum Perdata**, Umm Press, 2010, hal 20. Manusia adalah segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban (pendukung hak dan kewajiban). Apabila dikatakan setiap manusia merupakan orang maka ini berarti :

1. Bahwa tidak dikenal mengenai perbedaan berdasarkan agama, baik manusia itu beragama Islam, maupun beragama lain, mereka itu semuanya merupakan orang.
2. Bahwa antara kelamin yang satu dengan lainnya tidak diadakan pembedaan, jadi baik pria maupun wanita merupakan orang.
3. Bahwa tidak diadakan pembedaan antara orang kaya dengan orang miskin semuanya dianggap orang.
4. Bahwa tidak dibedakannya mengenai manusia dari Warga Negara Asing maupun Warga Negara Indonesia, jadi sampai hukum perdata barat ini berlaku bagi orang asing, maka dianggap sebagai orang asing.

⁶¹ Prof.Dr.M.Bakri,SH.,MS.,**Pengantar Hukum Indonesia Pembidangan dan Asas-Asas Hukum Jilid 2**, UB Press, 2013. Hal.16. Badan Hukum yang dapat mempunyai kekayaan terpisah dari kekayaan para anggotanya. Suatu perkumpulan yang dapat menjadi badan hukum dengan cara dimintakan sebuah pengesahan, sebagai berikut :

1. Didirikan dengan akta Notaris.
2. Didaftarkan di kantor Panitera Pengadilan Negeri setempat.
3. Dimintakan sebuah pengesahan anggaran dasar kepada Menteri Kehakiman.
4. Diumumkan dalam Tambahan Berita Negara.

perkawinan sebelum umur tersebut. sedangkan batas usia dewasa menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung berumur 18 Tahun.⁶²

Hubungan antara subjek hukum tersebut hak dan kewajiban manusia timbul karena adanya hubungan hukum satu dengan yang lainnya. hubungan antara subjek hukum tersebut berkaitan dengan benda sebagai objek hukumnya dan benda tersebut dapat dinilai dengan uang. Merek adalah Hak Kekayaan Intelektual yang di lindungi oleh Undang-undang. Siapa saja boleh mendaftarkan merek untuk penggunaan kepentingan perdagangan barang maupun jasa. Pendaftaran tersebut baik dilakukan subjek hukum manusia maupun atas nama badan hukum. Pendaftaran akan merek tersebut digunakan dengan iktikad baik, sesuai dengan yang di daftarkan, karena penggunaan merek yang telah terdaftar jika tidak sesuai dengan yang telah didaftarkan dapat berakibat hak atas merek tersebut dihapuskan.⁶³

Dalam penggunaan Merek sebagai salah satu media perdagangan yang tersebar didalam masyarakat, tak jarang keberadaan Merek merupakan salah satu nilai jual yang sangat tinggi, banyak nya Perusahaan yang berlomba-lomba memberikan pelayanan produk baik barang maupun jasa dengan menggunakan Merek sebagai ujung tombak penjualannya. Perseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk badan hukum yang banyak di jumpai dalam Masyarakat luas, dimana banyak Perseroan Terbatas memberikan merek sebagai salah satu asset Perseroan untuk menarik para konsumen membeli produk yang mereka tawarkan. Dalam

⁶² *Ibid*

⁶³ Yuliono, Gugatan Penghapusan Pendaftaran Merek (Studi Kasus Gugatan Penghapusan Pendaftaran Merek TOP), Tesis, Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro, 2010. Hlm. 65

Hal ini, Sebuah Perseroan Terbatas dalam mendirikan sebuah perseroan memiliki sebuah Organ Perseroan yaitu adanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisiaris dimana masing-masing anggota memiliki peran masing-masing dalam menjalankan Perseroan.

Perseroan Terbatas yang pendiriannya minimal 2 (dua) orang atau lebih sudah pasti dalam pendiriannya memiliki modal (saham) dari masing-masing tiap anggota Perseroan, sehingga modal tersebut merupakan modal yang digunakan untuk menjalankan sebuah Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan Terbatas itu didirikan. Direksi sebagai salah satu Organ Perseroan Terbatas mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk Perseroan Tersebut.

1.1. Kepemilikan Merek Perseorangan yang digunakan dalam Perseroan Terbatas Salah dalam Pemakaian

Pada umumnya, suatu produk barang dan jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum pasti diberikan sebuah tanda tertentu, yang berfungsi untuk membedakan produk barang dan jasa yang sejenis. Tanda tertentu merupakan sebuah tanda pengenal bagi produk barang dan jasa yang bersangkutan, yang lazimnya disebut dengan sebuah merek.⁶⁴ Wujudnya dapat berupa sebuah gambar, kata, nama, huruf-huruf, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.

Tatanan Kegiatan yang dilakukan yang berkaitan dengan transaksi barang atau jasa didalam negeri dan melampaui batas wilayah sebuah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau

⁶⁴ Usman Rachmadi, **Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual**. PT.Alumni.Bandung.2003.hal320

kompensasi hal itu dimaksud dengan perdagangan.⁶⁵ Barang merupakan setiap benda, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, baik bergerak maupun yang tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun yang tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, digunakan, dipakai atau dapat dimanfaatkan oleh konsumen atau oleh pelaku usaha.⁶⁶

Pada zaman sekarang kegiatan yang terkait dengan perdagangan, peran tanda pengenal makin menjadi penting, dimana masyarakat dapat memilih barang mana yang disukai dan mereka selanjutnya membeli atau memesan barang tersebut dengan menyebutkan mereknya saja. Dengan kata lain, merek membedakan dari barang-barang atau jasa yang sejenis itu dari berbagai macam mereknya.

Merek berfungsi sebagai daya pembeda dari sebuah produk barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum lain. Barang atau jasa yang telah dibuat oleh seseorang atau badan hukum merupakan sebuah barang yang sejenis, sehingga perlu diberikan sebuah tanda pembeda dan pengenal.

Dari pihak produsen, sebuah merek digunakan untuk jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas pemakaiannya, atau hal-hal lain yang pada umumnya berkenaan dengan teknologinya. Sedangkan bagi pedagang merek digunakan untuk melakukan sebuah promosi barang-barang dagangannya guna untuk mencari dan meluaskan pasaran.⁶⁷ Melalui sebuah merek dagang pada dasarnya para pengusaha dapat menjaga dan memberikan sebuah jaminan akan kualitas (*a guarantee of quality*) barang dan/atau jasa yang dihasilkan guna

⁶⁵ Lihat, Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

⁶⁶ Lihat, Pasal 1 ayat 5 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

⁶⁷ Adisumarto Harsono, **Hak Milik Intelektual, Khususnya Hak Cipta**, CV. Akademika Pressindo, Jakarta, hal 45

mencegah sebuah persaingan usaha tidak sehat dan tidak jujur dari pengusaha lain yang mempunyai itikad tidak baik.⁶⁸

Sebagaimana diatur dalam U.U Merek meliputi merek dagang dan merek jasa. Dalam Pasal 2, dapat disimpulkan bahwa U.U Merek membedakan merek itu menjadi dua macam yaitu merek dagang dan merek jasa. Selain itu juga dikenal dengan merek kolektif yaitu merek dagang atau merek jasa yang mana digunakan secara bersama-sama oleh beberapa orang atau badan hukum dalam sistem perdagangan.

U.U Merek dalam Pasal 1 ayat 2 tersebut menjelaskan mengenai sistem kategorisasi mengenai barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum, dari kategorisasi tersebut dapat dilihat dengan melalui sistem pendaftaran merek perseorangan itu sendiri dengan sistem kategorisasi sistem pendaftaran yang dilakukan oleh badan hukum.

Sebagai konsekuensi terhadap sistem konstitutif yang di atur didalam U.U Merek tersebut, hak atas Merek tercipta karena pendaftaran. Hal tersebut di atur dalam Pasal 3 U.U Merek menjelaskan bahwa hak atas Merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau dengan memberikan sebuah izin kepada pihak lain jika ingin menggunakan Merek tersebut.

Dengan melakukan sebuah pendaftaran, pemilik merek akan memperoleh hak eksklusif atas penggunaan Merek tertentu atau untuk memberikan izin kepada

⁶⁸RahmiJened IV, **Implikasi Persetujuan TRIPs Bagi Perlindungan Merek di Indonesia**, Yuridika, 2000, hlm.1-14

pihak lain untuk menggunakannya selama jangka waktu tertentu serta mendapatkan perlindungan hukum dari negara.⁶⁹

Hukum Merek di Indonesia sistem konstitutif menunjukkan betapa pentingnya makna lembaga pendaftaran merek di Indonesia. Lembaga Pendaftaran merek di Indonesia dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada pemegang atau pemilik merek. Prosedur Pendaftaran Merek dengan mengacu pada U.U Merek.⁷⁰ Pendaftaran merek diajukan kepada kantor Merek yaitu Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Departemen Hukum dan HAM. Ketika melakukan proses pendaftaran merek tidak semua permohonan yang diajukan akan dikabulkan karena permohonan tersebut dapat di tolak atau tidak dapat diterima.

Dasar hukum bagi permohonan pendaftaran merek yang tidak dapat diterima dan yang di tolak tersebut di atur didalam Pasal 4 , Pasal 5, dan Pasal 6 UU Merek. Dimana merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang mempunyai maksud tidak beritikad tidak baik. Merek itu sendiri tidak dapat didaftarkan apabila Merek tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan, moralitas agama maupun mengganggu ketertiban umum, merek tersebut tidak memiliki daya pembeda dengan merek lainnya, merek tersebut telah menjadi milik umum, dan Direktorat Jenderal harus menolak permohonan apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik orang lain yang sudah didaftarkan terlebih dahulu untuk jasa atau barang sejenis, merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya

⁶⁹Indirani Wauran, **Tinjauan Yuridis Mengenai Peniruan Merek**.Laporan Penelitian, Salatiga.FH-UKSW.hlm. 25.

⁷⁰*Ibid.*,hlm. 25-26

dengan merek yang sudah terkenal dengan milik pihak lain untuk barang maupun jasa sejenisnya dan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah di kenal. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual juga harus menolak Permohonan merek apabila menyerupai nama orang terkenal, foto, ataupun menyerupain nama badan hukum milik orang lain, kecuali dengan persetujuan tertulis dari yang berhak, atau juga merupakan tidruan atau singkatan nama, bendera, lambang negara, cap atau stempel resmi yang digunakan dalam lembaga pemerintahan dan juga symbol lembaga negara internasional maupun nasional kecuali atas izin dari pihak yang berwenang.

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara untuk melakukan permohonan pendaftaran merek diatur dalam :

1. Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 U.U Merek;
2. Pasal 1 sampai Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek.

Tata cara pengajuan Permohonan diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia kepada Direktorat Merek dengan Ketentuan:

1. mengisi Formulir permohonan
 - a. Permohonan diajukan dengan menggunakan formulir yang isinya dan bentuknya seperti dilampirkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek.
 - b. Pengisian mengenai formulir permohonan tersebut wajib dilakukan sebanyak rangkap empat dengan mencantumkan :
 - a) Tanggal, bulan dan tahun;

- b) Nama lengkap, alamat pemohon, kewarganegaraan, pemohon dalam hal ini dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang, atau badan hukum. Dalam hal permohonan diajukan lebih dari satu pemohon yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, semua nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat pemohon sebagai alat pendaftaran.
- c. Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan tersebut diajukan melalui kuasa;
- d. Tempat tinggal kuasa yang dipilih sebagai domisili hukumnya di Indonesia, apabila pemohon bertempat tinggal atau berkedudukan diluar wilayah Indonesia;
- e. Warna-warni apabila merek yang dilakukan permohonan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna;
- f. Jenis barang atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya, permohonan untuk dua kelas barang atau lebih dan atau jasa dapat diajukan dalam satu permohonan;
- g. Nama negara dan tanggal permontaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan dilakukan dengan menggunakan Hak prioritas.

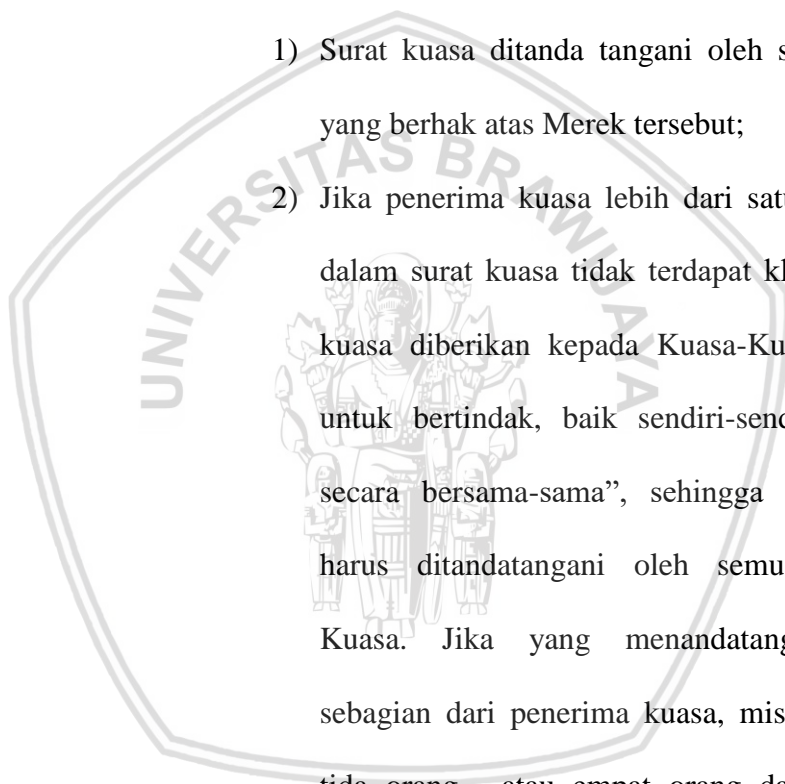
3. Menandatangani Permohonan

- a) Permohonan di tandatangani oleh pemohon atau kuasanya, dengan ketentuan dalam hal permohonan diajukan lebih dari satu pemohon yang secara bersama-

sama berhak atas merek tersebut, permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pihak dari pemohon yang berhak atas merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon yang mewakili.

b) Permohonan tersebut diajukan melalui kuasa (Konsultan H.K.I) permohonan ditandatangani oleh Kuasa dengan ketentuan:

- 1) Surat kuasa ditanda tangani oleh semua pihak yang berhak atas Merek tersebut;
- 2) Jika penerima kuasa lebih dari satu orang dan dalam surat kuasa tidak terdapat klausul “surat kuasa diberikan kepada Kuasa-Kuasa tersebut untuk bertindak, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama”, sehingga permohonan harus ditandatangani oleh semua penerima Kuasa. Jika yang menandatangani hanya sebagian dari penerima kuasa, misalnya hanya tiga orang , atau empat orang dari penerima kuasa yang berjumlah delapan orang, formulir permohonan yang ditandatangani oleh dua atau enam orang penerima kuasa itu mengandung resiko untuk dinyatakan tidak memiliki kekuatan berlaku dalam suatu sengketa yang mengemuka di pengadilan. Sehingga ada



baiknya setiap surat kuasa untuk mengajukan permohonan tersebut atau untuk keperluan lainnya, yang penerima kuasanya lebih dari satu orang, selalu disertai klausula “baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama”

Syarat permohonan setiap Permohonan wajib dilengkapi dengan :

1. Surat pernyataan pemilik merek

a. Tanda tangan dan isi

Surat pernyataan itu harus ditandatangani oleh pemilik merek dan bermaterai cukup dan dengan jelas dan tegas menyebutkan bahwa :

- 1) Merek yang dimohonkan pendaftaran adalah miliknya;
- 2) Merek yang dimohonkan pendaftaran tidak meniru merek orang lain baik untuk keseluruhan maupun pada pokoknya.

b. Terjemahan

Apabila tidak menggunakan bahasa indonesia, surat pernyataan itu harus disertai dengan terjemahannya menggunakan Bahasa Indonesia.

2. Etiket Merek

Jumlah Etiket Merek yang diperlukan adalah sebanyak dua puluh helai dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Ukuran

Etiket itu berukuran maksimal 9 X 9 Cm dan minimal 2 X 2 cm

b) Warna

Etiket berwarna, harus disertai satu lembar etiket yang tidak berwarna (hitam putih).

c) Terjemahan

Etiket merek yang menggunakan bahasa asing dan atau di dalamnya terdapat huruf selain huruf lain atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahas Indonesia wajib disertai dengan terjemahan dalam Bahasa Indonesia, dalam huruf latin, dan dalam angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia.

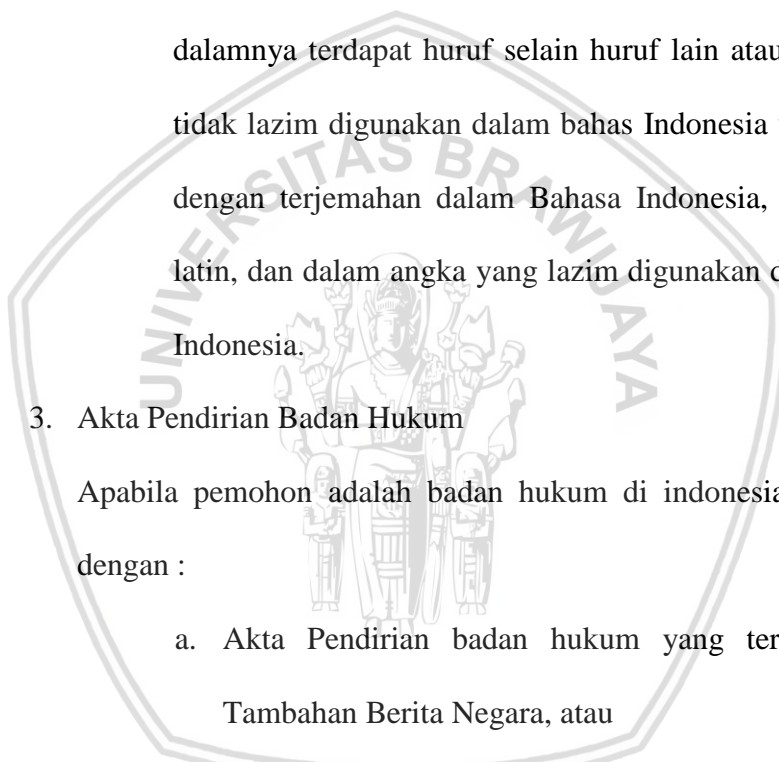
3. Akta Pendirian Badan Hukum

Apabila pemohon adalah badan hukum di indonesia, dilengkapi dengan :

- a. Akta Pendirian badan hukum yang termuat dalam Tambahan Berita Negara, atau
- b. Salinan yang sah Akta pendirian badan hukum

4. Surat Kuasa Khusus

Surat kuasa Khusus diperlukannya apabila permohonan diajukan melalui Kuasa, dengan ketentuan Surat Kuasa Khusus itu selain harus menyebutkan untuk mengajukan permohonan dengan menyebutkan mereknya.



Namun, surat kuasa khusus ini ini mutlak diperlukan jika permohonan diajukan oleh pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah negara Indonesia .

5. Pembayaran Biaya

Permohonan harus disertai dengan pembayaran biaya dalam rangka permohonan, sesuai dengan jenis dan besarnya biaya barang yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

6. Bukti penerimaan permohonan

Apabila permohonan diajukan dengan menggunakan hak prioritas, maka permohonan harus disertai dengan bukti penerimaan, permohonan yang pertama kali yang menimbulkan hak prioritas, dengan disertai terjemahan bahasa indonesia

7. Salinan peraturan penggunaan merek kolektif

Apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya akan digunakan sebagai salah satu merek kolektif, permohonan harus disertai dengan salinan peraturan penggunaan merek kolektif, dengan salinan peraturan penggunaan merek kolektif yang tidak menggunakan bahasa Indonesia harus disertai dengan terjemahan dalam bahasa Indonesia.

Setelah permohonan pendaftaran terhadap merek dipenuhi segala persyaratannya, maka Direktorat Jenderal H.K.I akan melakukan pemeriksaan substantive yaitu seperti diatur dalam Pasal 18 sampai Pasal 20 UU Merek. Pemeriksaan Substantif atas permohonan merek dimaksudkan untuk menentukan dapat atau tidaknya merek yang bersangkutan didaftarkan, yang dilakukan selama

waktu 9 (Sembilan) bulan paling lama, pemeriksaannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ada dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 UU Merek.

Pada Pasal 19 UU Merek, menegaskan bahwa pemeriksaan substantif ini atas permohonan pendaftaran merek dilaksanakan oleh pemeriksa pada Direktorat Jenderal H.K.I. kemudian, dari hasil pemeriksaan substantive akan dilakukan kesimpulan apakah permohonan akan pendaftaran merek dapat disetujui untuk di daftarkan apau di tolak. Dalam hal pemeriksaan menyatakan bahwa permohonannya dapat di setujui untuk didaftarkan, atas persetujuan Direktorat Jenderal H.K.I permohonan tersebut diumumkan dalam berita Resmi Merek. Bila sebaliknya, permohonan tidak dapat didaftarkan atau ditolak, maka atas persetujuan dari Direktorat Jenderal H.K.I dan diberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Pemohon atas kuasanya diberikan kesempatan selama 30 (tiga puluh) hari untuk menyampaikan tanggapannya atau keberatannya dengan menyebutkan alasan atas penolakan untuk didaftar.

Direktorat Jenderal H.K.I akan serta merta menetapkan keputusan secara tertulis mengenai penolakan permohonan pendaftaran mereka dengan menyebutkan mengenai alasan penolakan permohonan pendaftaran dengan menyebutkan alasanya jika pemohon atau kuasanya tidak menyampaikan mengenai tanggapannya atau keratin. Dalam hal permohonan ditolak, segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal H.K.I tidak dapat ditarik kembali. Apabila pemohon atau kuasanya menyampaikan mengenai keberatan atau tanggapan dan pemeriksaan melaporakn bahwa tanggapan tersebut dapat

diterima, atas persetujuan dari Direktorat Jenderal H.K.I permohonan tersebut akan diumumkan dalam Berita Resmi Merk.

Pengumuman akan permohonan pendaftaran merek sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 22 UU Merek, yaitu pengumuman permohonan pendaftaran merek yang disetujui dalam Berita Resmi Merk harus dilakukan oleh Direktorat Jenderal H.K.I yaitu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung dari tanggal disetujuinya permohonan untuk didaftar.

Pasal 23 UU Merek memuat mengenai hal yang harus dicantumkan dalam pengumuman permohonan pendaftaran merek, meliputi:

- a) Nama dan alamat yang lengkap pemohon, termasuk kuasa apabila permohonan tersebut melalui kuasa;
- b) Kelas dan jenis barang dan/atau jasa bagi merek yang dilakukan permohonan pendaftarannya;
- c) Tanggal penerimaan;
- d) Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas, dan
- e) Contoh merek termasuk keterangan mengenai warna dan apabila etiket merek menggunakan bahasa asing atau huruf selain huruf latin atau angka yang tidak lazim yang digunakan dalam bahasa Indonesia, yang disertai dengan terjemahannya kedalam bahasa Indonesia, huruf latin atau angka lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, serta mengenai cara pengucapannya dalam ejaan lain.

Pasal 27 UU Merek, menyatakan bahwa sertifikat merek akan diterbitkan dan diberikan oleh Direktorat Jenderal H.K.I kepada si pemohon atau kuasanya jika tidak telah memenuhi persyaratan dalam pemeriksaan secara substantive dan tidak adanya keberatan dari pihak lain dan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung dari tanggal permohonan tersebut disetujui untuk di daftarkan dalam Daftar Umum Merek. Sertifikat tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 3 UU Merek memuat :

- a) Nama dan alamat lengkap si pemilik merek yang didaftarkan;
- b) Nama dan alat lengkap kuasa, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasanya sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 10;
- c) Tanggal pengajuan dan tanggal penerimaan;
- d) Nama negara dan tanggal permohonan yang pertama kali apabila permohonan tersebut diajukan dengan menggunakan Hak prioritas;
- e) Etiket merek yang didaftarkan, termasuk keterangan mengenai macam-macam warna apabila merek yang dilakukan pendaftaran menggunakan unsur-unsur warna dan apabila merek yang didaftarkan menggunakan bahasa asing atau huruf latin atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, disertai dengan terjemahannya dalam bahasa Indonesia, serta huruf latin dan angka dalam bahasa Indonesia diserta cara pengucapannya dalam ejaan latin;
- f) Nomor dan tanggal pendaftaran;
- g) Kelas dan jenis barang atau jasa yang mereknya didaftarkan; dan
- h) Jangka waktu berlakunya pendaftaran merek

Maksud dari diberikannya hak khusus atau hak eksklusif tersebut kepada pemilik merek yang terdaftar adalah⁷¹:

a) Menciptakan hak tunggal (*sole or single right*)

Hukum atau Undang-undang memberikan sebuah hak tersendiri kepada pemilik merek, hak itu terpisah dan berdiri sendiri secara utuh tanpa campur tangan dari pihak lain;

b) Mewujudkan hak monopoli (*monopoly right*)

Pihak lain dilarang untuk meniru, memakai, dan mempergunakan dalam perdagangan barang dan jasa tanpa izin dari si pemilik merek tersebut;

c) Memberikan hak paling unggul (*superior right*)

Hak superior merupakan hak yang diberikan oleh doktrin hak yang dinilai paling unggul untuk pihak yang pertama. Sehingga, pemegang hak khusus atas suatu merek menjadi unggul dari merek-merek yang lain, untuk di lakukan perlindungan hukum.

Sedangkan dilihat dari sudut pandang Badan Hukum pendirian akan Perseroan Terbatas sebagai sebuah perseroan yang pendiriannya harus didaftarkan. Dimana pengusaha merupakan orang perseorangan, atau persekutuan maupun badan hukum yang menjalankan Jenis perusahaan. Kewajiban akan pendaftaran perseroan tersebut wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan, sedangkan untuk perusahaan kecil perorangan yang dijalankan oleh pribadi pengusaanya sendiri atau mempekerjakan hanya anggota keluarga terdekat maka tidak memerlukan sebuah izin usaha dan tidak

⁷¹Irwansyah Ockap Halomoan, **Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Terkenal Asing Dari Pelanggaran Merek di Indonesia**, Skripsi, Medan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm.29.

merupakan suatu badan hukum atau persekutuan. Dalam Pasal 11 UUWDP dijelaskan bahwa perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas, hal-hal yang wajib di daftarkan adalah mengenai nama perseroan , merek perseroan, jangka waktu berdirinya perseroan, tanggal pendirian perseroan, kegiatan pokok perseroan, izin usaha yang dimiliki, alamat perusahaan, alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu, dan agen perwakilan perseroan. Sedangkan untuk perusahaan yang berbentuk perorangan diatur dalam Pasal 15 U.U.W.D.P dimana hal-hal yang wajib didaftarkan adalah nama pemilik atau pengusahaanya, nomor tanggal tanda bukti diri, alamat tempat tinggal yang tetap , tempat dan tanggal lahir pemilik atau pengusaha, nama perusahaan dan merek perusahaan apabila ada.

Sehingga jelas ketika perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas harus mendaftarkan nama prseroan dan merek perusahaan yang dijalankan. Sedangkan dalam perusahaan perorangan merek perorangan belum tentu ada, boleh di daftarkan apabila merek perusahaan perorangan itu ada.

1.2. Dapat Dilakukan penghapusan Merek

Penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek diatur didalam Pasal 61 sampai Pasal 71 U.U Merek, dalam U.U Merek dikenal dengan istilah tuntutan penghapusan dan pembatalan merek pada hakekatnya mempunyai sebuah tujuan yang sama yaitu mencoret merek tersebut dari Daftar Umum Merek, yang membedakan dari kedua istilah tersebut yaitu tuntutan tersebut terletak pada beban pembuktian atau alasannya.

Penghapusan pendaftaran merek beban pembuktiannya berkaitan dengan merek yang didaftarkan digunakan tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang

dimintakan pendaftarannya dan tidak digunakannya lagi merek-merek yang didaftarkan.⁷²

Penghapusan pendaftaran merek dari daftar umum merek dapat dilakukan atas prakasa dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau dapat juga dilakukan atas permohonan pemilik merek yang bersangkutan. Pasal 63 UU Merek, menyatakan bahwa penghapusan pendaftaran merek dapat pula diajukan oleh pihak ketiga, yang diajukan kepada Pengadilan Niaga dan Pasal 67 menyatakan bahwa penghapusan merek kolektif dapat juga dilakukan dengan pihak ketiga dalam bentuk sebuah gugatan kepada Pengadilan Niaga.

Berdasarkan Pasal 61, Pasal 63 dan Pasal 67 UU Merek penghapusan merek terdaftar adanya 3 (tiga) cara yaitu : atas prakasa dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Pemilik merek itu sendiri dan adanya sebuah gugatan dari pihak ketiga.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atas prakasa dapat melakukan sebuah penghapusan pendaftaran merek terdaftar yaitu:⁷³

- a. Merek tidak digunakan (*non use*) selama 3 (tiga) tahun secara berturut-turut dalam dunia perdagangan dan/atau jasa sejak tanggal dilakukan pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila adanya sebuah alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pemakaian terakhir merupakan penggunaan merek tersebut dalam produksi barang atau jasa yang di perdagangkan. Saat pemakaian terakhir tersebut dihitung dari tanggal terakhir pemakaian sekalipun setelah itu barang bersangkutan masih

⁷² Insan Budi Maulana dan Yoshiro Smida, **Perlindungan Bisnis Merek Indonesia-Jepang**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994. hal. 85.

⁷³ Usman Rachmadi, *Op.cit.* hal 360

beredar didalam masyarakat luas, apapun alasan yang dipergunakan sebagai pengecualian penghapusan merek terdaftar oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual karena adanya larangan impor, larangan yang berkaitan dengan adanya sebuah izin bagi peredaran barang yang menggunakan merek bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara ataupun laranganserupa lainnya yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah; atau

- b. Merek yang digunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, termasuk merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftarkan. Ketidaksesuaian ini meliputi pula ketidaksesuaian dalam bentuk penulisan huruf atau kata atau ketidak sesuaian dengan penggunaan warna yang berbeda.

Pasal 63 dan Pasal 64 U.U Merek menyatakan, bahwa penghapusan merek berdasarkan alasan diatas dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual hanya akan melaksanakan penghapusan merek terdaftar dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek apabila putusan pengadilannya telah diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Keberatan mengenai putusan penghapusan merek terdaftar dapat di ajukan kepada pengadilan niaga, dimana pemilik atau kuasanya mengajukan permohonan penghapusan pendaftaran merek secara tertulis, baik sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa kepada Dirjen H.K.I. karena Dirjen H.K.I akan mencatat

penghapusan pendaftaran merek dalam Daftar Umum Merek dan akan dilakukan pengumuman dalam Berita Resmi Merek.⁷⁴

Mengenai tata cara penghapusan merek, dalam Pasal 65 U.U Merek menyatakan bahwa penghapusan pendaftaran merek dilakukan oleh Dirjen H.K.I dengan cara mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberikan catatan mengenai alasan dan tanggal penghapusannya, selanjutnya hal itu diberitahukan secara tertulis kepada si pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan mengenai penghapusan merek dan melakukan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi, sehingga penghapusan pendaftaran merek, mengakibatkan berakhirnya pula terhadap perlindungan hukum atas merek tersebut.⁷⁵

Sedangkan pembatalan pendaftaran merek beban pembuktiannya berkaitan dengan merek yang seharusnya ditolak Oleh Dirjen H.K.I karena bertentangan dengan Pasal 5 dan Pasal 6 U.U Merek, jadi yang menjadi alasan untuk mengajukan tuntutan pembatalan pendaftaran merek adalah:⁷⁶

1. Pendaftaran Merek yang diajukan atau dilakukan dengan itikad tidak baik (Pasal 68 ayat (1) jo Pasal 4), atau
2. Merek yang dilakukan pendaftaran tidak memenuhi syarat sebagai merek (Pasal 68 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a,b,c, dan d), atau

⁷⁴ Harsono Adisumarto, **Hak Milik Intelektual**, Khususnya Hak cipta, CV.Akademika Pressindo, Jakarta, 1990, hal 68

⁷⁵ Iswi Hariyani, **Prosedur Mengurs HAKI yang benar**, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hal. 47

⁷⁶ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, tentang Merek Pasal 5 dan Pasal 6

3. Merek yang di daftarkan sama dengan merek orang lain yang dilakukan pendaftaran terlebih dahulu untuk barang atau jasa yang sejenis (Pasal 68 ayat (1) jo Pasal 6 ayat (1)), atau
4. Merek yang dilakukan pendaftaran tidak mendapatkan persetujuan secara tertulis dari yang berhak (Pasal 68 ayat (1) jo Pasal 6 ayat 3).

B. Tinjauan Umum Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007

1.1. Bertentangan dengan Asas Perusahaan

Bila melihat pada peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (K.U.H.D) definisi mengenai perseroan terbatas tidak dijumpai dalam pasal-pasal K.U.H.D tersebut. Namun hal demikian menurut Sutantyo dan Sumartoto dari Pasal 36 , Pasal 40, Pasal 42 dan Pasal 45 K.U.H.D dapat disimpulkan bahwa sebuah Perseroan Terbatas mempunyai sebuah unsur yaitu:⁷⁷

- a. Adanya pemisahan kekayaan dari kekayaan pribadi masing-masing persero (pemegang saham) dengan tujuan untuk membentuk sebuah sejumlah dana untuk sebuah jaminan bagi semua perikatan perseroan;
- b. Adanya persero atau pemegang saham yang tanggung jawabnya terbatas pada jumlah nominal saham yang dimilikinya saja, sedangkan mereka semua di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) , merupakan sebuah kekuasaan tertinggi dalam sebuah organisasi perseroan yang berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan direksi dan komisiaris, serta berhak untuk menetapkan garis-garis

⁷⁷R HadikusumoSutantyo dan Soemantoro.**Pengertian Pokok Hukum Perusahaan, Bentuk-bentuk perusahaan yang berlaku di Indonesia.** Rajawali Pers. Jakarta. 1991.hal 40

besar kebijaksanaan menjalankan perusahaan , menetapkan hal-hal yang belum ditetapkan dalam anggaran dasar dan lain-lainnya.

- c. Adanya kepengurusan oleh direksi dan pengawasan yang dilakukan oleh komisiaris yang merupakan satu kesatuan sebuah pengurusan dan pengawasan terhadap perseroan dan tanggung jawabnya terbatas pada tugasnya, yang harus dilakukan sesuai dengan anggaran dasar atau dengan mengambil kebijakan dari keputusan RUPS.

Dalam peraturan UU P.T Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa Perseroan merupakan sebuah badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan melalui perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam sebuah saham dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang ini serta dilihat dari peraturan pelaksanaannya. Status badan hukum harus memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman untuk memperoleh pengesahan badan hukum Perseroan, para pendiri wajib untuk mengajukan permohonan kepada Menteri melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik dengan mengisi format sekurang-kurangnya adanya nama dan tempat kedudukan Perseroan, jangka waktu berdirinya Perseroan, maksud dan tujuan persroan tersebut didirikan, jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal yang disetor.

Akan tetapi bila dilihat dari Pasal 7 ayat 2 UU P.T Nomor 40 Tahun 2007 yaitu:

“Setiap Pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan”

Dapat dilihat sejak pertama kali sebuah Perseroan didirikan telah memperoleh sebuah kekayaan (modal) dari para pendirinya. Para Pendirinya inilah yang pertama kali sebagai pemegang saham pada saat Perseroan tersebut

didirikan. Jika Pasal 7 ayat 2 ini dikaitkan dengan Pasal 3 ayat 1 yaitu dimana Pemegang Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas sebuah perikatan yang telah dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita Perseroan melebihi saham yang dimiliki.

Dapat di tarik kesimpulan dimana para pendiri yang juga berkedudukan sebagai pemegang saham dalam perseroan yang didirikan tersebut tidak dibebani sebuah tanggung jawab secara pribadi atas sebuah perikatan yang telah dibuat dengan nama bersama dan tidak dibebani tanggung jawab melebihi nilai saham yang telah diambilnya terhadap kerugian yang telah diderita oleh perseroan. Sehingga dasar pendirian Perseroan adanya pemisahan harta kekayaan Pribadi antara pendiri, pemegang saham, Perseroan. Dalam Perseroan terdapat Organ Perseroan yaitu adanya R.U.P.S, Direksi dan Dewan Komisaris. Dimana seorang Direksi berwenang dan bertanggung jawab penuh atas segala kepengurusan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, sedangkan Dewan Komisaris merupakan Organ Perseroan yang bertugas melakukan sebuah pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan sebuah nasihat kepada Direksi dalam menjalankan tugasnya.

Badan Hukum yang melekat dalam Perseroan Terbatas tersebut haruslah memenuhi sebuah unsur-unsur dari badan hukum yaitu:⁷⁸

- a. Mempunyai sebuah harta kekayaan yang terpisah;
- b. Mempunyai sebuah tujuan;
- c. Mempunyai sebuah kepentingan;
- d. Mempunyai sebuah organisasi.

⁷⁸Budiarto Agus. **Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas**. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2002. Hal 29

Perseroan Terbatas mempunyai sebuah harta kekayaan tersendiri yang terpisah dari harta kekayaan pribadi. Dimana harta kekayaan Perseroan tersebut di dapat dari modal dasar, modal yang ditempatkan, dan juga modal yang disetor. Harta kekayaan ini sengaja dilakukan dan memang sangat diperlukan sebagai salah satu alat untuk mengejar tujuan Perseroan dalam hubungan hukum dengan masyarakat, yaitu salah satunya ketika membuat sebuah perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga. Dengan demikian harta kekayaan tersebut menjadi sebuah jaminan perikatan yang telah dibuat oleh Perseroan dengan pihak ketiga. Karenadikawatirkan jika dikemudian hari timbul sebuah tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi oleh Perseroan.

Maksud dan Tujuan dari Pendirian Perseroan Terbatas dapat diketahui dengan melihat Anggaran Dasar Pendirian Perseroan Tersebut. Bahkan biasanya Perseroan dari namanya sudah diketahui oleh masyarakat tujuan dari pendirian Perseroan Tersebut, misalnya PT. Bank Pembangunan Indonesia (PT.Bapindo), dilihat dari namanya sudah dapat diketahui bahwa PT. Bapindo menjalankan usahanya dibidang perbankan. Tujuan dari Perseroan tersebut bukan untuk kepentingan pribadi dari salah satu atau beberapa orang perseoroannya dan perjuangan untuk mencapai sebuah tujuan itu dilakukan oleh orga Perseroan yaitu Direksi.

Dalam hubungannya dengan unsur “memiliki kekayaan sendiri” merupakan bentuk usaha untuk mencapai sebuah tujuan tertentu, dimana Perseroan Terbatas mempunyai sebuah kepentingan yaitu mengenai hak-hak subyektifnya sebagai akibat dari peristiwa hukum yang dialaminya dan kepentingan itu merupakan kepentingan yang dilindungi oleh hukum, sehingga

Perseroan Terbatas yang mempunyai kepentingan sendiri dapat menuntut dan mempertahankan kepentingannya terhadap pihak ketiga.

Perseroan Terbatas yang berbetuk badan hukum dalam dunia hukum, diterima sebagai Person disamping manusia. Badan hukum yang merupakan suatu kesatuan sendiri hanya dapat melakukan perbuatan hukum melalui organ dalam Perseroan tersebut. Dalam Perseroan Terbatas, ia mempunyai anggaran dasar yang dimuat dalam akta pendiriannya yang mencerminkan keberadaan suatu organisasi yang teratur.

Dalam Pasal 15 UU P.T Nomor 40 Tahun 2007 jelas menyatakan bahwa Anggaran Dasar Perseroan Terbatas memuat sekurang-kurangnya;

- a. Nama dan tempat kedudukan Perseroan;
- b. Tujuan dan Maksud dari kegiatan usaha Perseroan;
- c. Jangka waktu Perseroan tersebut didirikan;
- d. Besarnya jumlah modal dasar, modal disetor, dan modal yang ditempatkan;
- e. Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi dimana adanya hak-hak yang melekat pada setiap saham dan nominal saham;
- f. Jumlah anggota dan nama Jabatan baik Direksi maupun Komisaris;
- g. Penempatan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- h. Tata cara pengangkatan, pemberhentian, penggantian anggota Direksi dan Komisaris;
- i. Tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden.

Selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (3) UU PT menyatakan bahwa dalam Anggaran dasar tidak boleh memuat mengenai penerimaan bunga tetap atas saham dan ketentuan mengenai pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain. Ditinjau dari U.U W.D.P Hal-hal yang wajib diperhatikan ketika mendirikan sebuah Perseroan Terbatas diatur dalam Pasal 11 U.U W.D.P yaitu:

1. Nama perseroan;
2. Merek perusahaan;
3. Tanggal pendirian perseroan;
4. Jangka waktu berdirinya perseroan;
5. Kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha perseroan;
6. Izin usaha yang dimilinya;
7. Alamat perusahaan (alamat setiap kantor cabang,kantor pembantu dan agen serta perwakilan perseroan).

Sedangkan untuk perusahaan yang berbentuk perorangan dalam hal ini diatur dalam Pasal 15 U.U W.D.P yaitu :

1. Nama lengkap pemilik atau nama pengusaha dan setiap alias-aliasanya
2. Nomor dan tanggal tanda bukti
3. Alamat tempat tinggal yang tetap
4. Alamat dan negara tempat tinggal yang tetap, apabila tidak bertempat tinggal tetap di wilayah Republik Indonesia;
5. Tempat dan tanggal lahir dari pemilik atau pengusaha
6. Negara tempat tanggal lahir apabila dilahirnya diwilayah negara Republik Indonesia;

7. Nama perusahaan dan merek perusahaan apabila ada
8. Kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha;
9. Izin-izin usaha yang dimiliki
10. Jumlah modal tetap perusahaan apabila ada;
11. Tanggal pengajuan permintaan pendaftaran.

Sehingga ditinjau dari U.U W.D.P kepemilikan merek dengan perusahaan pada waktu perusahaan tersebut didirikan tidak boleh dipisahkan, apalagi di U.U W.D.P mewajibkan bahwa perusahaan P.T harus adanya merek dan nama perusahaan. Merek digunakan untuk mengetahui apakah yang di produksi oleh P.T tersebut sehubungan dengan merek yang ada dalam Perusahaan tersebut.

1.2. Bertentangan Dengan Tugas Direksi

Pasal 1 ayat (5) UU P.T mendefinisikan salah satu Organ Perseroan yaitu Direksi. Direksi merupakan Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap kepengurusan suatu Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan tersebut didirikan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan yang dimuat dalam ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Definisi seorang Direksi tersebut sangatlah komprehensif dan secara kesatuan menampilkan sisi esensialnya yaitu mengenai kedudukan serta perannya sebagai salah satu Organ Perseroan dan tugasnya yaitu mencakup kewenangan serta tanggung jawab terhadap Perseroan. Sehingga dapat diuraikan 5 (lima) aspek hukum penting yaitu sebagai berikut: ⁷⁹

1. Aspek Hukum tentang Organ Perseroan Terbatas;

⁷⁹Simanjuntak Cornelius, S.H., M.H., Mulia Natalie, S.H., M.Kn. **Organ Perseroan Terbatas**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 27

2. Aspek Hukum tentang Kewenangan serta tanggung Jawab
3. Aspek Hukum tentang cangkupan dari Kepentingan Perseroan;
4. Aspek Hukum tentang maksud dan tujuan Perseroan;
5. Aspek Hukum tentang representasi Perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan;
6. Aspek Hukum anggaran dasar Perseroan.

Secara umum sangatlah sederhana, syarat untuk menjadi anggota Direksi sebuah Perseroan Terbatas yaitu orang perseorangan yang cakap melakukan sebuah perbuatan hukum, hal tersebut sangatlah jelas di atur dalam Pasal 93 ayat (1) UU P.T. Dalam Pasal 93 ayat (1) menunjukkan bahwa “orang perseorangan” menunjukkan “manusia” (*natural person*) dan melarang anggota Direksi dijabat oleh suatu badan usaha (*corporate directors*) seperti hal nya yang dilakukan di beberapa negara lain salah satunya yaitu Hong Kong.⁸⁰

Syarat umum menjadi anggota Direksi menjelaskan bahwa mereka yang cakap melakukan sebuah perbuatan hukum tidaklah serta merta langsung dilakukan pengangkatan menjadi seorang Direksi, namun adanya filter (saringan) yang harus dilewatinya yakni orang yang cakap melakukan sebuah perbuatan hukum tersebut dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum dilakukan pengangkatannya :

- i. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - ii. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;
- atau

⁸⁰Benny S. Tabalujan dan Valerie Du Toit-Low, **Singapore Business Law**, Business Law Asia, Singapura, 2003, Edisi ke-3, hlm.2267.

- iii. Tidak pernah dihukum sebelumnya karena melakukan sebuah tindakan pidana yang telah merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Patokan mengenai jangka waktu selama 5 (lima) Tahun tersebut adalah sejak dikeluarkannya sebuah putusan dari Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap hal itu bisa dilihat dari penjelasan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Seorang calon Direksi guna membuktikan dipenuhinya persyaratan yang memuat mengenai bebas pailit, bebas sebagai penyebab pailit, dan juga bebas dari status pidana (3B) maka dalam Pasal 93 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas mewajibkan kepada calon Direksi menyerahkan sebuah surat pernyataan yang akan disimpan oleh Perseroan.⁸¹

Walaupun dalam Pasal 93 UUP.T mengatur mengenai kewajiban menjadi anggota Direksi dengan sebuah Perseroan berkaitan dengan surat pernyataan, namun calon anggota Direksi hendaknya menerbitkan surat pernyataan tersebut dengan substansi isinya yang sesuai dengan fakta sebenarnya, karena dalam Pasal 95 ayat (1) UUP.T pengangkatan anggota Direksi akan batal karena hukum jika anggota Direksi lainnya (jika calon anggota Direksi lebih dari satu) tidak terpenuhinya syarat 3B tersebut akan batal demi hukum.

Tugas pokok menjadi seorang Direksi mengenai kepengurusan Perusahaan dalam Pasal 92 ayat (1) UUP.T berisikan mengenai tugas utama menjadi Direksi yaitu menjalankan sebuah kepengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Kepengurusan Perseroan merupakan kepengurusan sehari-hari dari perseroan, dimana memberikan sebuah

⁸¹Simanjuntak Cornelius dan Natalie Mulia, Loc. Cit.

kedudukan yang unik dari seorang Direksi sebagai sebuah Organ Perseroan dimana dalam Organ Perseroan ada yang lain yaitu R.U.P.S dan Dewan Komisaris tidak mempunyai tugas dan kewajiban ini. Karena Komisaris dan R.U.P.S tidak diwajibkannya untuk berkumpul bersama setiap hari namun akan berkumpul dalam rapat yang telah digariskan dalam anggaran dasar dari sebuah Perseroan.

Tugas yang melekat dari seorang Direksi yaitu melakukan sebuah kepengurusan Perseroan Setiap Harinya membawa sebab akibat hukum bagi Direksi yaitu mengenai adanya Tanggung Jawab atas Kepengurusan Perseroan. Dalam menjalankan kepengurusan Perseroan seorang Direksi harus dengan iktikad baik (*good faith*) dan secara bertanggung Jawab.

Tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh Direksi dalam menjalankan kepengurusan sehari-hari untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan dari Perseroan dalam sistem *common law* dikenal dengan prinsip *fiduciary duties*. Dengan prinsip *fiduciary duties* seorang Direksi memiliki hubungan fidusia⁸² dengan Perseroan tersebut, dimana Direksi tersebut akan mengikatkan diri dengan Perseroan untuk bertindak dengan iktikad baik untuk melakukan kemanfaatan atau menjadikan Perseroan mendapatkan keuntungan. Segala hak dan kewajiban yang di berikan kepada Direksi harus dijalankan untuk memajukan kepentingan Perseroan.

Prinsip ini ditegaskan oleh Sutan Remy Sjahdeini⁸³ yang mengatakan bahwa “kepentingan dan tujuan usaha perseroan” dan “ikhtikad baik dan penuh

⁸² Benny S. Tabalujan dan Valerie Du Toit-Low, Loc.cit., hlm.229

⁸³ Sjahdeini Sutan Remy, **Hukum Kepailitan memahami Faillissementsverordening juncto Undang-Undang No.4 Tahun 1998**, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, hlm.425.

tanggung jawab” merupakan kedua unsur tersebut bersifat integral dari pengelolaan perseroan oleh Direksi dimana harus dipenuhi secara kumulatif bukan alternated, artinya harus di penuhi kedua-duanya.

Arti cangkupan Kepentingan perseroan dalam hal ini dapat dilihat dari penjelasan Pasal 108 ayat (2) U.U.P.T yang sebenarnya memuat tentang fungsi pengawasan yang dilakukan dari Dewan Komisaris yaitu pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris tidak untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu, tetapi untuk kepentingan Perseroan secara menyeluruh dan sesuai dengan maksud dan tujuan dari Perseroan.

Dalam Pasal 108 ayat (2) U.U.P.T mendefinisikan “kepentingan perseroan” berkaitan erat dengan “maksud dan tujuan perseroan” dan hal ini sejalan dengan Pasal 92 ayat (1) U.U.P.T, dimana memperhatikan dari Pasal tersebut dari elemen “kepentingan perseroan” dengan “maksud dan tujuan perseroan”. Dalam buku Organ Perseroan Terbatas⁸⁴ memberikan karakteristik terhadap kedua elemen tersebut dimana “kepentingan perseroan” dikarakteristikan secara negative yang diawali dengan kata “tidak yaitu tidak untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu, tetapi untuk kepentingan Perseroan secara menyeluruh.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 7 U.U.P.T, dimana Perseroan Terbatas merupakan sebuah badan hukum yang artinya oleh Undang-Undang diberikan sebuah kedudukan *standi persona* yaitu dijadikan sebagai subjek hukum mandiri di samping manusia.⁸⁵ Sebagai badan hukum yang berstatus *persona standi in judicio*, pelaksanaan pengelolaan Perseroan oleh

⁸⁴Simanjuntak Cornelius dan Natalie Mulia, Loc. Cit., hlm. 45

⁸⁵RudhiPrasetya, **Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas cetakan ke-3**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001,hal. 27-28

Direksi haruslah untuk kepentingan perseroan karena status yang dimiliki oleh Perseroan Terbatas sebagai badan hukum melekatnya hak dan kewajiban, sebagaimana manusia.⁸⁶

Sedangkan Perseroan harus mempunyai sebuah maksud dan tujuan Pokok Perseroan, dimana kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan tersebut, haruslah jelas dan terperinci dalam anggaran dasar, dan rincian tersebut tidaklah boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan, ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, ketertiban Umum dan/atau kesusilaan.

Karena apabila kegiatan Usaha Perseroan tidak memuat maksud dan tujuan mengenai Usaha pokok Perseroan dalam Anggaran Dasar Perseroan tanpa adanya uraian kegiatan usaha, maka pengesahan terhadap Perseroan akan ditolak oleh Menkum H.A.M, sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 21 ayat (2) huruf b U.U.P.T, karena Menkum H.A.M merupakan satu-satunya otoritas yang telah mengesahkan sebuah akta pendirian dan memberikan persetujuan mengenai pengubahan anggaran dasar yang menyangkut mengenai maksud dan tujuan dari kegiatan usaha perseroan.

B. Analisis Keterkaitan Antara Kepemilikan Merek Perseorangan Yang Digunakan Dalam PT.Sentosa Jaya Abadi Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Serta Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Melalui Putusan Pengadilan Niaga

⁸⁶ Benny S.Tabalujan dan Valerie Du Toit-Low, Loc.Cit.,hlm.271

**Surabaya Nomor: 08/HKI.MEREK/2014/PN.NIAGA.SBY Terkait
Dengan Kasus Merek “GOOD DAY”**

1.1 Putusan Pengadilan Niaga Surabaya

Nomor:08/HKI.MEREK/2014/PN.NIAGA.SBY

Posisi kasus para pihak yang berpekara adalah PT. Santos Jaya Abadi selaku Penggugat/Tergugat Rekopensi melawan SoedomoMergonoto selaku Tergugat/Penggugat Rekopensi. Kasus ini berawal dari gugatan yang di layangkan oleh PT. Santos Jaya Abadi yang diwakilkan oleh Singgih Gunawan, Ihsan Mulia Putri dan Samuel Guntur. Dimana Perusahaan PT. Santos Jaya Abadi dahulu bernama PT. Jaya CoffeCompani didirikan pada tahun 1979 dan pada Tahun 1980 Dirubah namanya menjadi PT. Santos Jaya Abadi telah memproduksi dan memperdagangkan produk jenis usaha kopi. Dimana para pendiri saham dari PT.Santos Jaya Abadi salah satunya adalah SoedomoMergonoto yang juga berkedudukan sebagai Direksi PT.Santos Jaya Abadi.Karena kedudukan SoedomoMergonoto sebagai Direksi, berarti segala tindakan yang berkaitan dengan Perseroan merupakan untuk kepentingan Perseroan.Perseroan yang menjalankan usaha kopi, akhirnya mengembangkan usahanya dan akhirnya terciptanya merek “GOOD DAY”.

SoedomoMergonoto dalam hal ini mendaftarkan merek “GOOD DAY” menggunakan nama pribadinya. Padahal dalam hal ini posisi SoedomoMergonoto sebagai Direksi dari PT. Sentosa Jaya abadi

Gambar 1.



Sumber: *Data Sekunder, diolah, 2016.*

Bahwa dalam gugatannya PT. Santos Jaya Abadi menjelaskan bahwa penggugat merupakan pihak yang memiliki kepentingan atas merek “GOOD DAY” karena merek “GOOD DAY” merupakan salah satu bentuk pengembangan usaha dari Penggugat dan selama ini penggugat yang telah memproduksi serta mengembangkan usaha merek “GOOD DAY” melalui infrastruktur dan jaringan yang telah dimiliki sepenuhnya oleh Penggugat. Bahwa dalam menjalankan usahanya tersebut Penggugat telah melakukan pengembangan dan memperluas jaringan bisnis usahanya dengan terus mencoba membuat terobosan lain, melakukan penelitian serta beberapa kali melakukan percobaan dengan mengeluarkan atau memperdagangkan hasil produksinya dipasaran dengan menggunakan beragam merek lain yang merupakan pengembangan variasi produk minuman kopi merek Kapal Api, antara lain yaitu dengan merek “GOOD DAY”. Dengan melakukan pengembangan tersebut merek “GOOD DAY” menjadi merek yang dikenal oleh khalayak ramai seperti saat ini.

Penggugat dalam gugatannya pun menjelaskan bahwa pendaftaran merek “GOOD DAY” atas nama tergugat diajukan atas dasar itikad tidak baik, karena pada saat itu Tergugat berkedudukan sebagai Direktur Utama PT.Santos Jaya Abadi yang wajib melakukan pengurusan untuk kepentingan Perseroan, termasuk untuk melakukan pengembangan merek dagang Perseroan, justru pendaftaran Akan merek “GOOD DAY” didaftarkan menggunakan nama pribadi yaitu SoedomoMergonoto.

Namun dalam Eksepsinya, Tergugat yaitu SoedomoMergonoto menolak dengan tegas bahwa telah terjadi penyelewengan atau melakukan sebuah penyimpangan, karena jika memang pihak tergugat melakukan sebuah penyelewengan sehingga menyebabkan kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan sebuah kerugian pada Perseroan, maka sebelumnya harus ada permintaan pertanggung jawaban terlebih dahulu kepada Direksi atas kerugian apa yang terkait dengan kepengurusan Perseroan. Namun kenyataannya tidak pernah ada permintaan pertanggungjawaban yang diajukan oleh pihak PT.Sentosa Jaya Abadi kepada SoedomoMergonoto. Pihak SoedomoMergonoto menyatakan bahwa pihak dari PT.Sentosa Jaya Abadi tidak memiliki Legal Standing menggugat pembatalan merek atas nama SoedomoMergonoto (nomor pendaftaran IDM000263030 untuk kelas barang 30 yang dengan tanggal pendaftaran merek 3 Agustus 2010 dengan tanggal penerimaan 4 juni 2010 dengan nomor permohonan R002010003484) dengan melakukan pembatalan Merek.Walaupun Merek “GOOD DAY” dimiliki oleh SoedomoMergonoto, namun Merek “GOOD DAY” tetap digunakan dalam kegiatan produksi dan pemasaran oleh PT.Santos Jaya Abadi secara Cuma-Cuma.

Gambar 2



Sumber: *Bahan Sekunder, diolah, 2016.*

1.2. Pertimbangan Hukum dan Putusan Hakim

Terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga Surabaya telah memberikan putusan Nomor: 08/HKI.MEREK/2014/PN.NIAGA.SBY tanggal 21 April 2015 yang menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menyatakan bahwa terdaptarnya merek “GOOD DAY” atas nama Tergugat yaitu SoedomoMergonoto adalah sehubungan dengan kedudukan Tergugat sebagai Direksi dan menyatakan bahwa merek “GOOD DAY” telah terdaftar atas nama SoedomoMergonoto sejak tahun 1990 di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang terdaftar pada kelas 30, yang diperpanjang pada tanggal 3 Agustus 2010 dengan Nomor perpanjangan pendaftaran IDM 000 263 030 merupakan perpanjangan dari Nomor pendaftaran 260099 tanggal 4 juni 1990, sehingga benar memiliki merek atas nama SoedomoMergonoto dengan nomor pendaftaran IDM 000 263 030 untuk kelas barang 30 dengan tanggal pendaftaran merek 3 Agustus 2010, Nomor permohonan R002010003484.

Merujuk pada Putusan Pengadilan Niaga Surabaya yang menyatakan bahwa Tergugat Rekopensi/Penggugat PT.Santos Jaya Abadi untuk secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat

Rekopensi/Tergugat yaitu SoedomoMergonoto sebesar 8.000.000.000 (delapan milyar rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp.100.000.000.000 (Seratus Milyar Rupiah).

Analisa Putusan Terhadap Pengadilan Niaga Surabaya tersebut yaitu mengenai hak atas merek merupakan hak eksklusif yang lahir karena adanya sebuah pendaftaran merek pada lembaga yang berwenang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Dirjen HKI), dalam pasal 3 UU Merek 2001 menyebutkan bahwa pemilik merek terdaftar memiliki hak eksklusif, dimana melarang pihak ketiga yang tanpa izin dan tanpa sepengetahuan si pemilik merek untuk menggunakan merek yang sama untuk barang dan/atau jasa yang telah didaftarkan dalam Dirjen HKI. Dalam UU Merek 2001 sistem yang digunakan adalah sistem *first to file* yaitu memberikan sebuah hak atas merek bagi yang mendaftarkan pertama kali mereknya kepada Dirjen HKI.⁸⁷

Dalam hal ini pihak yang pertama kali mendaftarkan merek “GOOD DAY” kepada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dengan atas nama Soedomo Mergonoto di kelas barang 30 yang diperpanjang pada tanggal 3 Agustus 2010 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM 000 263 030 adalah perpanjangan dari Nomor pendaftaran 260099 tanggal 4 juni 1990 dan diperkuat dengan surat jawaban dari SoedomoMergonoto yang menyatakan bahwa SoedomoMergonoto adalah Pemegang Hak Atas Merek “GOOD DAY” dengan atas nama SoedomoMergonoto dengan Nomor Pendaftaran IDM000263030 untuk kelas barang 30 dengan tanggal pendaftaran merek 3 Agustus 2010, Nomor

⁸⁷Subandini Nur tyas Utami, **Tinjauan Penerapan Klasifikasi Barang dan Jasa Berdasarkan Nice Classification Dalam Rangka Pendaftaran Merek Di Indonesia**, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2014, hlm.1-2

Permohonan R002010003484, dengan jangka perlindungan adalah 10 Tahun. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagai pihak turut Tergugat, dalam dupliknya dengan surat tertanggal 19 Januari 2015 pada poin 8 telah mengemukakan bahwa sesuai dengan data yang terdapat pada daftar umum merek telah terdaftar merek “GOOD DAY” atas nama SoedomoMergonoto dengan Nomor ID 000 263 030 untuk melindungi barang termasuk dalam kelas 30 yaitu salah satunya adalah Kopi bubuk, kopi biji dan kopi instan.

Bahwa dengan terdaftarnya merek “GOOD DAY” menggunakan nama SoedomoMergonoto yang berkedudukan sebagai seorang Direksi pada PT. Sentosa Jaya Abadi telah dikuatkan dengan adanya bukti yang telah diajukan oleh Turut Tergugat yaitu berupa bukti TT-1, TT-Ia, dan TT-1b yang menunjukkan bahwa didalam daftar umum merek yang terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atas merek “GOOD DAY” telah terdaftar atas nama tergugat kurang lebih 25 Tahun.

Setiap orang berhak untuk melakukan sebuah pendaftaran akan merek kepada Direktorat Jenderal H.K.I karena merek merupakan sebuah Kekayaan yang di Lindungi oleh Undang-undang. Merek dagang yang sering di jumpai dalam masyarakat merupakan merek dagang yang harus terjamin akan mutu dan kualitasnya, sehingga adanya kepastian hukum mengenai merek yang dikonsumsi oleh masyarakat menjadikan para konsumen tidak takut untuk menggunakan barang yang di produksi secara terus menerus untuk memenuhi kebutuhannya.

Peran merek dinilai sangat penting untuk dilakukan pendaftaran di Dirjen H.K.I , Terdaftarnya merek “GOOD DAY” atas nama SoedomoMergonoto yaitu perorangan akan tetapi sehubungan dengan kedudukan SoedomoMergonoto

sebagai Direksi dari PT.Sentosa Jaya Abadi, dalam hal ini U.U P.T pasal 1 (5) menyatakan bahwa seorang direksi yang berwenang atas pengelolaan sebuah perseroan untuk melakukan kepentingan perseroan, sesuai dengan tujuan perseroan, mengacu lagi Pendirian Perseroan merupakan sebuah badan hukum yang didirikan berdasarkan persekutuan modal, yang didirikan berdasarkan sebuah perjanjian, dan melakukan kegiatan usahanya berdasarkan modal Perusahaan. Dalam U.U.Merek Pasal 1 ayat (2) bahwa adanya kategorisasi kepemilikan merek perseorangan dengan merek dagang milik Perseroan. Kategorisasi dapat dilihat salah satunya dari proses pendaftaran yang dilakukan pendaftaran pribadi dengan melakukan pendaftaran perseroan.

Mengingat permasalahan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem perlindungan merek di Indonesia saat ini belum mencapai sebuah tingkat efektifitas yang baik, mengingat merek perseorangan dapat digunakan dalam Perusahaan dan dilakukannya tanpa sepengetahuan dari P.T bahwa merek tersebut dilakukan kepemilikannya oleh Perorangan yaitu direksinya dan tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk penggunaan merek perorangan yang digunakan dalam P.T dan dilakukannya produksi atas merek tersebut selama beberapa tahun dan melakukan produksi secara terus menerus, padahal Perseroan merupakan badan hukum yang berdiri dengan persekutuan modal, dengan pencantuman merek tersebut menggunakan nama P.T yang memproduksi secara otomatis masyarakat umum mengetahui, bahwa merek tersebut di produksi dari P.T bukan dari milik perorangan, padahal kepemilikannya atas merek tersebut dimiliki dari perorangan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kepemilikan Merek Perseorangan Yang Digunakan Dalam Perseroan Terbatas Terbukti Bertentangan Dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Dan Kepemilikan Merek Perseorangan Yang Digunakan Dalam Perseroan Terbatas Bertentangan Dengan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, karena kepemilikan merek perseorangan yang digunakan dalam P.T terbukti salah pemakaian, karena adanya kategorisasi kepemilikan merek yang digunakan dalam P.T dengan merek yang digunakan untuk perseorangan, sehingga dapat diajukan penghapusan merek terdaftar, karena pemakaiannya tidak sesuai dengan merek yang didaftarkan. Ditinjau dari UU.P.T bertentangan dengan asas perseroan, dimana P.T didirikan berdasarkan pemisahan harta kekayaan pribadi, dan direksi bertugas sebagai pengurus perseroan, bukan sebagai pemilik dari merek yang dijalankan oleh P.T.
2. Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor: 08/HKI.MEREK/2014/PN.NIAGA.SBY terkait dengan kasus merek “GOOD DAY” , memutus kepemilikan merek tersebut atas nama perorangan. Padahal perkembangan dari P.T tersebut telah ada didalam masyarakat dari tahun 1979 dan dikenal dimasyarakat telah memproduksi dengan mutu yang bagus, hal itu dilihat keberadaan merek tersebut beredar dipasaran sampai sekarang. Pendirian dari P.T sudah pasti memiliki nama

dan hasil produksi untuk di jual di khalayak masyarakat, namun dalam putusan Pengadilan Niaga Surabaya dalam perkara ini memenangkan perseorangan yaitu Direksi dari P.T sebagai pemilik merek “GOOD DAY”, setiap orang berhak untuk mendaftarkan merek menggunakan nama pribadinya, namun tidak tepat apabila merek perseorangan digunakan dalam perseroan, walaupun itu kedudukannya sebagai Direksi. Direksi menjalankan pengurusan untuk P.T, namun bukan berarti harta pribadi dapat menjadi sebuah Asset P.T.

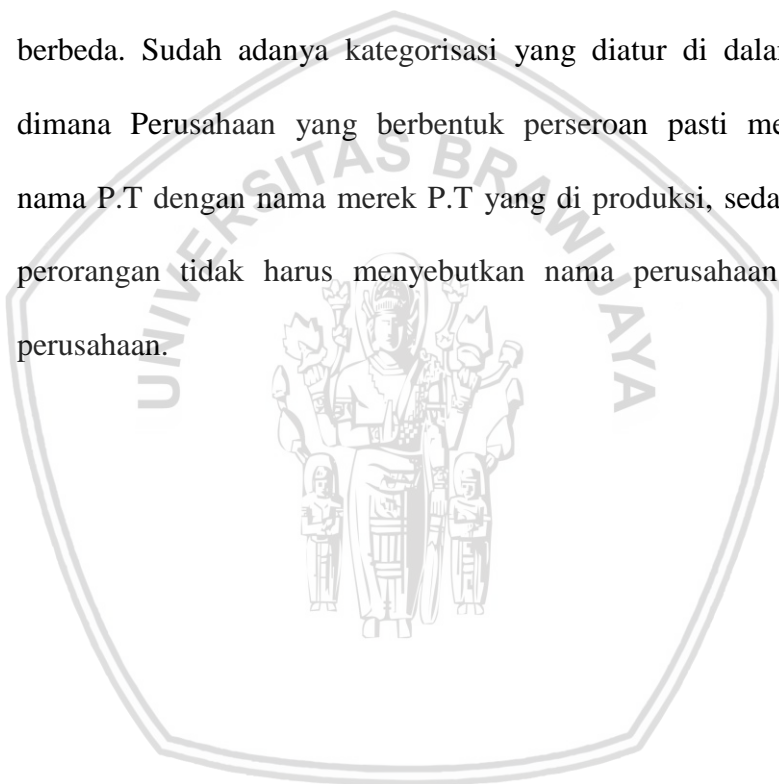
Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini bertentangan dengan UU.P.T dimana asset pribadi tidak boleh di campur adukkan dengan asset dalam P.T

B. Saran

- a. Antara kedua belah pihak yang bersengketa dapat melakukan sebuah perdamaian. Kedua belah pihak dengan melakukan sebuah perdamaian akan mengakhiri suatu perkara yang sedang terjadi, Perseroan yang sudah didirikan secara turun temurun, serta direksi dari perseroan yang sudah lama dipercaya dan juga menaruh saham dalam Perseroan pastinya sudah sangat kenal baik dengan para pihak, baik dalam perseroan maupun dengan Direksi secara pribadi.
- b. Perjanjian perdamaian antara kedua belah pihak dapat dilakukan dengan melakukan Lisensi dalam Undang-Undang Merek Nomor 15 tahun 2001 pasal 43 yaitu dimana pemilik merek berhak memberikan sebuah Lisensi kepada pihak lain dengan melakukan sebuah perjanjian si

penerima lisensi akan menggunakan merek tersebut sebagian atau seluruhnya.

- c. Pertimbangan Hakim terhadap perkara tersebut bahwa Pendirian Perseroan sebagai salah satu perusahaan otomatis adanya Wajib Daftar Perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga mengacu adanya sistem kategorisasi yang diatur dalam UUWDP Nomor 3 tahun 1982 yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas dan Perseorangan yang berbeda. Sudah adanya kategorisasi yang diatur di dalam UUWDP, dimana Perusahaan yang berbentuk perseroan pasti mencantumkan nama P.T dengan nama merek P.T yang di produksi, sedangkan untuk perorangan tidak harus menyebutkan nama perusahaan dan merek perusahaan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rasyid Salima, **Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus**, Kencana, Jakarta, 2005.
- Adisumarto Harsono, **Hak Milik Intelektual, Khususnya Hak Cipta**, CV. Akademika Pressindo, Jakarta.
- Ahmad M. Ramli, **Hak atas Kepemilikan Intelektual: Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang**, CV. Mandar Maju. Bandung, 2000.
- A James Barrow JD cs, **Law For Business Law**, Irwin, Boston.
- Amiruddin dan Zainal, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Andrew Hicks & Sh Goo, **Case & Materials On company law**, Blastone Press Limited, 1994.
- Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Benny S. Tabalujan dan Valerie Du Toit-Low, **Singapore Business Law**, Business Law Asia, Singapura, 2003.
- Budiarto Agus, **Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas**, Ghalia Indonesia. Jakarta. 2002.
- Direktorat Jenderal HKI, **Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Pertanyaan & Jawabannya)**, Ditjen HKI, Depkeh & HAM, Jakarta, 2000.
- Emmie Yuhassarie, ed, **Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya : Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya Tahun 2004**, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2009.
- Hadhikusuma SR dan Sumantoro, **Pengertian Pokok Hukum Perusahaan**, CV. Rajawali. Jakarta, 1992.
- H.M.N Purwosutjipto, S.H., **Pengantar Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 2**, Djambatan, Jakarta

Insan Budi Maulana dan Yoshiro Smida, **Perlindungan Bisnis Merek Indonesia-Jepang**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994

Jonny Ibrahim, **Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Banyumedia, Malang, 2007.

Komariah, **Hukum Perdata**, Umm Press, 2010.

Kurnia Slamet Titon, **Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs**, PT. Alumni, Bandung, 2011.

Mertokusumo Sudikno, **Penemuan hukum**, Liberty, Yogyakarta

Miru Ahmadi, S.H., **Hukum Merek**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Muchsin, **Ihtisar Hukum Indonesia**, Badan Penerbit Iblam, 2005.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

OK Saidin, **Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (intellectual Property right) Cetakan keempat**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Prof. Dr. M. Bakri, S.H., M.S., **Pengantar Hukum Indonesia Pembidangan dan Asas-Asas Hukum Jilid 2**, UB Press, 2013.

Prof. Dr. H. Djakfar Muhammad S.H., M.Ag., **Hukum Bisnis Membangun Wacana Integritas Perundang Nasional dengan syariah**, UIN-Malang Press, 2009.

Purba P Marisi, **Aspek Akutansi Undang-undang Perseroan Terbatas**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2008

Rahayu Hartini, **Hukum Komersial**, UMM Press, Malang, 2003.

Rahmi Jened IV, **Implikasi Persetujuan TRIPs Bagi Perlindungan Merek di Indonesia**, Yuridika, 2000.

R Hadikusumo Sutantyo dan Soemantoro, **Pengertian Pokok Hukum Perusahaan, Bentuk-bentuk perusahaan yang berlaku di Indonesia**, Rajawali Pers, Jakarta, 1991.

Ronny Hanitijo, **Metode Penelitian Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

Rudhi Prasetya, **Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas cetakan ke-3**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual property Rights)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997.

Simanjuntak Cornelius, S.H., M.H., Mulia Natalie, S.H., M.Kn. **Organ Perseroan Terbatas**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Sjahdeini Sutan Remy, **Hukum Kepailitan memahami Faillissementsveror dening juncto Undang-Undang No.4 Tahun 1998**, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002.

Soemitro, **Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf**, PT. Eresco, Bandung, 1993. hal23

Subekti, *Aneka Perjanjian Cetakan kesepuluh.* PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1995.

Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata, **Hukum Merek Indonesia**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993

Supramono Gatot, S.H., M.Hum, **Hukum Perseroan Terbatas**. Djambatan. Jakarta, 2009.

Syahrul, S.E Muhammad Afni Nazar, S.H., Ardiyas, *Kamus lengkap Ekonomi*, Citra Harta Prima, Jakarta, 2000.

Usman Rachmadi, **Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual**. PT. Alumni, Bandung, 2003.

Wirjono Projodikoro, **Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu**, Vorkin-van Hoeve, Bandung, 1959.

W.J.S Poerwadarminta, **Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Diolah kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional**. Balai Pustaka. Jakarta

Yahya M Harahap, S.H., **Hukum Perseroan Terbatas**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Skripsi dan Tesis :

Irwansyah Ockap Halomoan, **Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Terkenal Asing Dari Pelanggaran Merek di Indonesia**, Skripsi, Medan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Subandini Nur tyas Utami, **Tinjauan Penerapan Klasifikasi Barang dan Jasa Berdasarkan Nice Classification Dalam Rangka Pendaftaran Merek Di Indonesia**, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2014

Yuliono, **Gugatan Penghapusan Pendaftaran Merek (Studi Kasus Gugatan Penghapusan Pendaftaran Merek TOP)**, Tesis, Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro, 2010

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1993 tentang tata cara Permintaan Pendaftaran Merek

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 Tentang Daftar Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan .

Putusan Pengadilan :

Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 08/HKI.MEREK.2014/PN.NIAGA.SBY

Internet :

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol23162/merek-ispecial-slimming-teai-dihapuskan> Di akses pada tanggal 5 Maret 2016 pukul 19:00 WIB